

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN DALAM
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
(Studi pada Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Pringsewu)**

DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

FITRIANITA DAMHURI

NPM. 1970031003



**PROGRAM DOKTOR (S3) PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2022 M**

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN DALAM
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
(Studi pada Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Pringsewu)**

DISERTASI

Oleh:

FITRIANITA DAMHURI

NPM. 1970031003

PROGRAM STUDI S3 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

Promotor I: Prof. Dr. H. M. NASOR, M.Si.

Promotor II: BAMBANG BUDIWIRANTO, Ph.D.

Promotor III: Dr. ARI DARMASTUTI, M.A.



**PROGRAM DOKTOR (S3) PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2022 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FITRIANITA DAMHURI**
NPM : 1970031003
Program Studi : S3 Pengembangan Masyarakat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi saya yang berjudul “**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (Studi pada Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Pringsewu)**” adalah hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bandar Lampung, 30 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



FITRIANITA DAMHURI

NPM. 1970031003

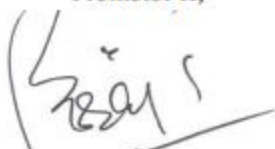
**PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR DISERTASI
PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Promotor I,



Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si.

Promotor II,



Bambang Budiwiranto, Ph.D

Promotor III,



Dr. Ari Darmastuti, M.A.

Mengetahui
Ketua Program Studi S3 PMI
PPs UIN Raden Intan Lampung,




Dr. Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I

Nama : **FITRIANITA DAMHURI**
NPM : **1970031003**
Angkatan : **2019**
Program Studi : **S3 Pengembangan Masyarakat Islam**

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI DISERTASI

Judul Disertasi : Pemberdayaan Perempuan Pedesaan dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam (Studi pada Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Pringsewu)
Nama : FITRIANITA DAMHURI
NPM : 1970031003
Program Studi : S3 Pengembangan Masyarakat Islam

Telah dipromosikan dalam Ujian Terbuka dan telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Disertasi Program Studi S3 Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Tim Sidang :  Tanda Tangan
Ketua Sidang : Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D. (.....)
Sekretaris : Dr. Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd., Kon (.....)
Penguji II : Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si. (.....)
Penguji III : Bambang Budiwiranto, Ph.D. (.....)
Penguji IV : Dr. Ari Darmastuti, M.A. (.....)
Penguji V : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si (.....)

Bandar Lampung, 30 Desember 2022

Direktur Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

NIP. 19800801 200312 1 001

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (Studi pada Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Pringsewu)

Pendekatan keagamaan dalam pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi menjadi salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sangat strategis, baik dari sisi internal yaitu perempuan itu sendiri, maupun dari sisi eksternal yaitu akses, kesempatan, dan lingkungan yang mempengaruhi. Dilihat dari angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pringsewu sudah di atas capaian angka IDG Provinsi Lampung tetapi untuk indikator sumbangan pendapatan perempuan berada di posisi paling rendah diantara kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Konsentrasi penduduk miskin yang sebagian besar berada di pedesaan, komposisi penduduk yang hampir berimbang antara perempuan dan laki-laki serta ketimpangan yang cukup besar dalam kontribusi perempuan di sektor ekonomi. Potensi ekonomi Muslimat NU di Kabupaten Pringsewu saat ini belum dikembangkan secara terstruktur dan sistematis, sehingga belum optimal memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan. Penelitian bertujuan memperoleh strategi pemberdayaan perempuan pedesaan dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam.

Metode penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan metode kualitatif dan desain studi kasus atau *case study research design*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi serta studi dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* terdiri dari sasaran perencana, pelaksana dan pendampingan, sasaran suasana yang mendukung dan sasaran pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pringsewu.

Hasil penelitian bahwa perempuan diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas ekonomi diluar rumah dengan tetap mendapatkan izin dan dukungan suami serta tetap bertanggungjawab dalam aktivitas rumah tangga. Strategi dan Upaya Pemberdayaan Perempuan Pedesaan Muslimat NU yaitu; (1) Penanaman motivasi dan prinsip "sedekah", dilakukan lebih utama jika bersumber dari usaha sendiri dibandingkan dengan pemberian suami, (2) Pemasaran produk dan jasa diawal dilaksanakan dengan prinsip tolong-menolong dan gotong-royong dalam kelompok jemaah, kemudian dalam perkembangan berikutnya terjadi perluasan pasar keluar jemaah Muslimat NU, (3) Pelibatan suami dan keluarga dalam mendukung kegiatan ekonomi, dan (4) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, Bimtek dan pendampingan serta pengembangan bantuan permodalan dari LAZISNU.

Rekomendasi agar strategi pemberdayaan perempuan pedesaan dalam perspektif Pengembangan Masyarakat Islam dilaksanakan dengan memperhatikan faktor-faktor nilai etika "sedekah", tolong-menolong dan gotong royong, dukungan suami/keluarga serta peningkatan kapasitas dan bantuan permodalan untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam sektor ekonomi.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perempuan Pedesaan, Kontribusi Ekonomi, Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam

ABSTRACT

EMPOWERMENT OF RURAL WOMEN IN ISLAMIC COMMUNITY DEVELOPMENT PERSPECTIVE (Study on Muslimat Nahdatul Ulama Pringsewu Regency)

The religious approach in empowering women from an economic perspective is one of the most strategic approaches to community empowerment, both from the internal side, namely women themselves, as well as from the external side, namely access, opportunity, and the influencing environment. Judging from the IDG figure, Pringsewu Regency is already above the achievement of the IDG figure for Lampung Province, but for indicators of income contribution, women are in the lowest position among regencies/cities in Lampung Province. Concentration of the poor population, which is mostly in rural areas, the composition of the population is almost balanced between women and men and adds quite a lot to the contribution of women in the economic sector. The economic potential of Muslimat NU in Pringsewu Regency has not yet been developed in a structured and systematic way, so that it has not optimally contributed to improving the welfare of rural women. This study aims to obtain a strategy for empowering poor rural women in an Islamic community development perspective.

This research method is an analytical research using qualitative methods and case study design or case study research design. Data collection was carried out using in-depth interviews and observation and study documentation. Informants were selected using a purposive sampling technique consisting of planning, implementing and mentoring targets, supporting targets and community empowerment targets in Pringsewu Regency.

The results showed that women were given the opportunity to carry out economic activities outside the home while still getting permission and support from their husbands and remaining responsible for household activities. Strategies and Efforts to Empower Muslimat NU Rural Women, namely; (1) The cultivation of motivation and the principle of "alms", is carried out more primarily if it is sourced from one's own business compared to the husband's gift, (2) Marketing of products and services is carried out initially with the principle of mutual assistance and mutual cooperation in congregational groups, then in subsequent developments there was an expansion of the market outside the Muslimat NU congregation, (3) the involvement of husbands and families in supporting economic activities, and (4) capacity building through training, technical guidance and assistance and the development of capital assistance from LAZISNU.

Recommendations that the rural women's empowerment strategy in an Islamic community development perspective be implemented by taking into account the ethical value factors of "alms", mutual help and mutual cooperation, husband/family support as well as capacity building and capital assistance to increase women's contribution in the economic sector.

Keywords: Empowerment, Rural Women, Economic Contribution, Islamic Community Development Perspective

الملخص الملخص

تمكين المرأة الريفية الفقيرة من المنظور الإسلامي
(دراسة عن مسعمة نهضة العلماء في مقاطعة برينجسو)

يعتبر النهج الديني لتمكين المرأة من خلال منظور اقتصادي من أكثر المقاربات استراتيجية في تمكين المجتمع ، سواء من الجانب الداخلي ، أي النساء أنفسهن ، وكذلك من الجانب الخارجي ، أي الوصول والفرص والبيئة المؤثرة. تمتلك مقاطعة برينجسو مؤشر التمكين المرأة أكثر من مؤشر المقاطعة لامبونج، ومع ذلك ، في مؤشرات مساهمة الدخل ، تعد مساهمة المرأة في أدنى مركز بين المقاطعات / المدن في مقاطعة لامبونج. في برينجسو ، يتركز معظم الفقراء في المناطق الريفية ، والتركيبة السكانية على أساس الجنس متساوية وتم العثور على تناقض كبير في مساهمة المرأة في القطاع الاقتصادي. تهدف هذه الدراسة إلى الحصول على استراتيجية لتمكين المرأة الريفية الفقيرة من منظور إسلامي.

هذا بحث تحليلي باستخدام الأساليب النوعية وتصميم دراسة الحالة. تم جمع البيانات باستخدام المقابلات المتعمقة والملاحظة ودراسات التوثيق. تم اختيار المخبيرين باستخدام تقنية أخذ عينات هادفة تتكون من مخططين ومنفذين وموجهين وأهداف لجو داعم وتمكين المجتمع في مقاطعة برينجسو.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه تم منح المرأة فرصة القيام بأنشطة اقتصادية خارج المنزل من خلال الحصول على إذن ودعم من أزواجهن ولكنهن ما زلن مسؤولات عن الأنشطة المنزلية.

استراتيجيات وجهود لتمكين المرأة الريفيات المسلمات في مسعمة نهضة العلماء على النحو التالي : ١- إن غرس الدافع ومبدأ "الصدقة" من عمل المرأة أكثر أهمية من هبة الزوج ، ٢- تنفيذ تسويق المنتجات والخدمات في البداية بمبدأ المساعدة المتبادلة والمساعدة المتبادلة في مجموعات المصلين ، ثم في التطورات اللاحقة كان هناك توسع في السوق خارج مسعمة نهضة العلماء ، ٣- إشراك الأزواج والأسر في دعم الأنشطة الاقتصادية ، ٤- بناء القدرات من خلال التدريب والتوجيه الفني والمساعدة وكذلك تطوير المساعدة الرأسمالية من وكالة إدارة الزكاة نهضة العلماء.

يوصى بتنفيذ استراتيجيات تمكين المرأة الريفية من منظور إسلامي من خلال مراعاة القيم الأخلاقية لـ "الصدقات" ، والمساعدة المتبادلة والمساعدة المتبادلة ، ودعم الزوج والأسرة ، وكذلك بناء القدرات والمساعدة الرأسمالية لزيادة مساهمة المرأة في القطاع الاقتصادي.

لكلمات المفتاحية: التمكين ، المرأة الفقيرات ، الريفيات ،
المنظور الإسلامي

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirohmanirohiiim*

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sesuai dengan yang diharapkan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Lampung, Ibu Wakil Gubernur Lampung dan Bapak Sekda Provinsi Lampung, yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis menempuh pendidikan S3 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Nesor, M.Si. selaku Ketua Komisi Promotor yang telah membantu penulis dalam penyelesaian perkuliahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi. Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Bambang Budiwiranto, Ph.D. dan Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Promotor II dan Promotor III atas arahan bimbingan, masukan, koreksi dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program S3 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung beserta unsur pimpinan Pascasarjana dan segenap jajaran yang telah memberikan bantuan dan bimbingan pada penulis;
3. Ibu Dr. Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I selaku Ketua Prodi S3 PMI dan Bapak Dr. M. Mawardi, J, M.Si. selaku Sekretaris Prodi S3 PMI UIN Raden Intan Lampung beserta segenap jajaran yang telah memberikan bantuan dan bimbingan pada penulis;
4. Para Dosen dan Pengajar serta seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan dan bimbingan serta memfasilitasi selama proses perkuliahan dan penulisan disertasi;
5. Bupati Pringsewu, Sekda Kabupaten Pringsewu, Ketua PC NU Pringsewu dan Ketua PC Muslimat NU Pringsewu yang telah memberikan izin lokasi penelitian, beserta seluruh jajarannya yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini;
6. Terimakasih penulis sampaikan juga kepada seluruh tim enumerator yang telah banyak membantu proses pengumpulan data dalam penyelesaian penelitian dan disertasi ini;

7. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan, khususnya pada Program Studi S3 Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung tahun 2019; Doktor (Can) Jumari, Doktor Supriyanto, Pak Zikri, Pak Supron, Mas Fathur dan Mas Fatih atas segala bantuan dan kerjasama selama ini;
8. Penulis ucapkan terima kasih kepada guru-guru dan sahabat-sahabat spesial yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas do'a dan dukungannya agar penulis melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan S3 di UIN Raden Intan Lampung.

Penulis berharap agar disertasi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga Allah yang Maha-Pengasih dan Maha-Penyayang memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin ya robbal 'aalamiin.*

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Bandar Lampung, 30 Desember 2022
Penulis,

FITRIANITA DAMHURI
NPM. 1970031003

PERSEMBAHAN

Disertasi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tuaku, Ayahanda Drs. H. Damhuri Matsir (almarhum) dan Ibunda Dra. Hj. Suwidayati serta Papi H. Hamzah S.Y. ZA (almarhum) dan Mami Hj. Armeini Lukman, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, dorongan dan do'a dengan tulus sehingga penulis menyelesaikan pendidikan sampai S3.

Yang sangat istimewa, Suamiku tercinta, Dr. Noviansyah, S.T., M.Kes., AAH yang mendo'akan dan menyemangatiku serta bersama-sama menempuh pendidikan, juga anakku tersayang Kakak Salsabila Putri Fiansyah, Abang M. Hafizh Putra Fiansyah dan Adek M. Fadhlhan Putra Fiansyah yang membuat mama semangat.

Adik-adikku dan Uda, Uni serta keluarga besar atas segala do'a dan dukungannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINILITAS/KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI DISERTASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK ARAB	viii
KATA PENGANTAR	ix
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Deskripsi Konseptual	13
1. Kemiskinan	13
2. Ekonomi Keluarga	19
3. Pemberdayaan Masyarakat	25
4. Gender, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan	29
5. Pengembangan Masyarakat Islam	45
6. Pengembangan Masyarakat ke Pemberdayaan Masyarakat	50
7. Kesejahteraan Masyarakat	64
B. Penelitian Terkait Yang Relevan	68
C. Kerangka Pikir Penelitian	73
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Jenis dan Desain Penelitian	74
B. Tempat dan Waktu Penelitian	77
C. Sumber Data	77
D. Metode atau Teknik Pengumpulan Data	78
E. Metode Analisis Data	79
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	80

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Gambaran Lokasi Penelitian	82
1. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu	82
2. Gambaran Subjek Penelitian	86
B. Temuan Penelitian	91
1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Muslimat NU dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam	105
2. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Muslimat NU	107
3. Peningkatan Akses dan Manfaat Perempuan pada Sektor Ekonomi	112
C. Pembahasan	116
1. Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam	117
2. Upaya Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam	129
2.1 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Usrah)	130
2.2 Pemberdayaan Kelompok Sosial (Jamaah)	136
2.3 Pemberdayaan Masyarakat (Ummah)	138
3. Pemberdayaan Perempuan untuk Meningkatkan Akses dan Manfaat dalam Sektor Ekonomi	143
 BAB V PENUTUP	 153
A. Kesimpulan	153
B. Rekomendasi	154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Provinsi Lampung Periode Maret 2020 - Maret 2021	2
1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Lampung Tahun 2020	2
1.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2018	3
1.4 Data Persentase Perempuan Miskin Berstatus Kepala Rumah Tangga di Provinsi Lampung Berdasarkan DTKS Tahun 2020	5
3.1 Daftar Informan & Lokasi Penelitian	77
4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020	82
4.2 Komposisi Penduduk Per Kecamatan di Kab. Pringsewu Tahun 2020	83
4.3 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kab Pringsewu Tahun 2020	83
4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2018-2020	84
4.5 Jumlah Rumah Tangga dan Individu menurut Status Kesejahteraan per Kecamatan di Kabupaten Pringsewu	86

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
1.1 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015-2019	1
1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Provinsi Lampung Agustus 2018 – Agustus 2020	4
2.1 Kerangka Pikir Penelitian	73
3.1 Langkah-Langkah Penelitian	76
4.1 Perbandingan IPM Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015 – 2020	85
4.2 Struktur Organisasi Muslimat NU Kabupaten Pringsewu Periode 2020-2025	89
4.3 Formulir E-Catalog Usaha Mikro	109
4.4 Pemasaran Hasil Produk	110
4.5 Hasil Produk Beberapa Kelompok Usaha	112
4.6 Data IKM yang Terdaftar di Dinas Koperindag	114
4.7 Hierarki Kebutuhan Maslow	150
4.8 Ilustrasi Strategi Pemberdayaan Perempuan Pedesaan	152

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perizinan Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Mendalam
- Lampiran 3 *Check List* Observasi dan Dokumen
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia

Transliterasi yang dipakai dalam Disertasi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Januari 1988.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	`	ء	`
ذ	z	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F		-

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya; ربنا ditulis *rabbânâ*.

2. Vocal panjang (*mad*);

Fathah (baris diatas) ditulis â, *kasrah* (baris di bawah) ditulis î, serta *dammah* (baris di depan)ditulis û. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المسالكين ditulis *al-masâkin*, المفلحون *al-muflihûn*

3. Kata sandang *alif + lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ'*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya

Misalnya; وهو خير ازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

B. Pengertian Tentang Transliterasi

Alih adalah pindah atau ganti transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad satu ke abjad yang lain. Menurut kamus besar Indonesia Transliterasi atau alih huruf adalah pergantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata sebenarnya).

Jadi transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya, misalkan alih aksara, dari aksara Jawa ke huruf latin, dari huruf jawa ke huruf latin, dari aksara Arab ke huruf latin. Beberapa penulis menggunakan sumber berbahasa Inggris beserta alih aksarannya, dalam bahasa Inggris yang sering digunakan adalah alih aksara Qalam, kadang-kadang perbedaan alih aksara ini dengan alih aksara kritis Indonesia menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan pembacaan. Contoh alih aksara Qalam (Inggris), Omar, hadith. Alih aksara kritis Indonesia, Uts, mar, hadist.

C. Penyerapan Kata dalam Transliterasi

Kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami *penyederhanaan* atau *perubahan*, baik dalam hal penulisan maupun pengucapannya. Sebagai contoh, huruf **ق (qaf)** pada *Irak, Ya'kub, akhlak, fikih, kadar, dan kaidah* telah diserap menjadi **k**; sedangkan pada *Qur'an* dan *Masjidil Aqsa* tetap bentuknya dan dialihaksarakan sebagai **q**. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara alih aksara dan kata serapan tersebut:

No	Penulisan Arab	Alih Aksara Kritis	Alih Aksara diplomatik	Perubahan	Kata dari alih aksara kritis	Kata Serapan
1.	ع	'a	'a	A	Assalamu'alaykum, 'Ashr, 'Abdullah, 'Abdul Muththalib, 'Aisyah, 'Amr	Assalamualaikum, Ashar, Abdullah, Abdul Muttalib
2.	ع	'i	'i	I	'Isa, 'Isya', 'Idul Fitri, 'Idul Adhha, al-'Iraq, dhua'afa', dha'if. Adh-Dha'ifah	Isa, Isya, Idul Firi, Idul Adha, Irak, duafa, dhaif, adh-Dhaifah
3.	ع	'u	'u	U	'Umar ibn al-Khaththab	Umar bin Khattab

D. Pedoman Transliterasi (Alih Aksara)

Tabel dibawah ini menyajikan pedoman alih aksara:

Huruf Arab	Alih aksara	Keterangan
ا	A a	
ب	B b	
ت	T t	
ث	Š š	S dengan satu titik di atas
ج	J j	
ح	Ḥ ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Kh kh	
د	D d	
ذ	Ẓ ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	R r	
ز	Z z	
س	S s	
ش	Sy sy	
ص	Ṣ ṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	Ḍ ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	Ṭ ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓ ẓ	z dengan satu titik di bawah

Penulisan kata majemuk dapat dilakukan menurut alih aksara kata perkata atau alih bunyi.

Transliterasi	Transkripsi
Abd Allah	Abdullah, Abdillah, Abdallah
Nashir al-Din	Nashiruddin
Sidrat Al-Muntaha	Sidratul Muntaha
Syu'ab al-iman	Syu'abul Iman

Ditulis berdasarkan alih aksara (transliterasi) atau alih bunyi (transkripsi). Transliterasi ini mengikuti gaya penulisan dalam bahasa inggris atau untuk keperluan pengurutan abjad, sedangkan transkripsi lebih banyak penggunaannya dalam bahasa Indonesia yang cenderung menuliskan kata sebagaimana pengucapannya.

Transliterasi	Transkripsi
al-Din	ad-Din
al-Rahman	ar-Rahman
al-Tirmidzi	at-Tirmidzi

Ditulis dengan huruf capital (Al) atau tidak (al)

Al	al
Al-Qur'an	al-Qur'an
Al-Bukhari	al-Bukhari
Al-Albani	al-Albani

Perincian

A. Tā' marbūṭat

Tā' marbūṭat (ة) pada ism nakirat, atau didahului oleh alif lām ta'rīf, atau dalam lafaz murakkabaṭ ditransliterasikan sebagai *f*. Contoh:

- امرأة : mir'āt
- الرسالة : al-risālat
- وزارةالتعليم : wizārat al-ta'līm

Tā' marbūṭat pada kata hāl, zarf atau maṣdar, serta yang bertanwīn ditransliterasikan sebagai *t(an)*, *t(in)*, atau *t(un)*. Contoh:

- فجأة : fuj'at(an)
- ساعة : sā'at(un)

B. Hamzat

Hamzat (ء) yang terdapat di awal kata ditransliterasikan sebagai *a*, *i*, atau *u*. Contoh:

- ابرار : abrār
- ان : inna
- امرت : umirtu

Hamzat mati, atau hidup di belakang konsonan atau diftong ditransliterasikan sebagai koma atas ('). Contoh:

- المسألة : al-mas'alaṭ
- الرأي : al-ra'y

C. Alif māddat

Alif māddat (ا) ditransliterasikan sebagai ā. Contoh: القرآن : al-Qur'ān

D. Syiddat

Huruf yang mempunyai tanda Syiddat (◌ْ) ditransliterasikan sebagai huruf berganda.

Contoh:

- ربنا : rabbanā
- كشاف : kasysyāf
- ثواب : tawwāb
- قوة : quwwat(un)

...kecuali syiddat di atas huruf wāw selepas konsonan berbaris depan di akhir kata, maka ditransliterasikan sebagai ūw, atau di atas huruf yā' selepas konsonan berbaris bawah di akhir kata, maka ditransliterasikan sebagai ŷy. Contoh:

- النبي : al-nabīy
- عدو : adūw(wun)

E. Tanwīn

Simbol-simbol tanwīn pada ism nakirat yang manqūṣ dan maqṣūr serta pada hāl, zarf dan maṣdar perlu dibunyikan. Contoh:

- راض : rāḍin
- معنى : ma'nan
- سرعة : sur'aṭan

F. Alif lām al-ta'rīf

Alif lām (ال) al-ta'rīf, tidak kira sama ada dihubungkan oleh sebutan sebelumnya atau tidak, atau sama ada ia syamsīyyat atau qamarīyyat, ditransliterasikan sebagai al-(al dengan tanda sempang). Contoh:

- بستان العارفين : bustān al-'ārifīn
- ابن النور : ibn al-nūr

Penulisan

Cantumkan dan pisahkan kata mengikuti ideograf yang terdapat dalam bahasa Arab sendiri. Contoh:

- لا إكراه في الدين : lā ikrāha fi al-dīn
- لا دين لمن لا عقل له : lā dīna liman lā 'aqla lah

Huruf besar

Gunakan huruf besar menurut sistem ejaan bahasa Melayu. Contoh:

- ابن سينا : Ibn Sīnā
- أبو بكر الصديق : Abū Bakr al-Ṣiddīq
- الحمد لله : Al-ḥamdulilLāh

Transliterasi ringan

Berikut adalah panduan tambahan untuk kaedah transliterasi ringan yang menjadi kelaziman dalam penulisan.

- Tā' marbūṭah boleh dilambangkan dengan *t* atau *h* mengikut kesesuaian.
- Huruf thā' boleh dilambangkan dengan *s*.
- Huruf dhāl boleh dilambangkan dengan *z*.
- Tanda-tanda diakritik khas (seperti titik dibawah *ṣ* dan garis di bawah *ḥ*) boleh diabaikan.
- Tanda koma atas yang melambangkan 'ayn atau hamzat boleh digugurkan atau digantikan dengan *k* mengikut kesesuaian.
- Huruf musyaddad (mempunyai tanda syiddah) pada akhir kalimah tak perlu digandakan. Contohnya: ملف boleh ditulis *ma'laf*.
- Diftong yang berakhir dengan yā' boleh dilambangkan dengan *aid an* diftong yang berakhir dengan wāw boleh dilambangkan dengan *au*. Contohnya حنفي boleh ditulis Hanafi dan عو boleh ditulis .
- Kalimat عبد yang diikuti oleh alif lām dalam nama orang boleh ditransliterasikan sebagai *Abdul* dan ditambah tanda jarak. Contohnya, عبد الرحمن boleh ditulis *Abdul Rahman*.

BAB I PENDAHULUAN

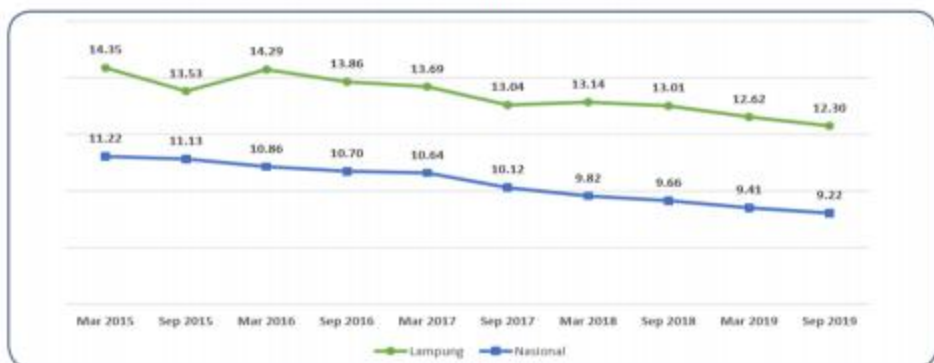
A. Latar Belakang Masalah

Sampai dengan akhir abad ke-20, permasalahan kemiskinan masih menjadi isu utama di seluruh dunia. Negara-negara di seluruh dunia meresponnya dengan menyepakati pertemuan pada September 2000 yang diikuti oleh 189 negara dengan mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan *Millenium Development Goals* (MDG's), dimana salah satu targetnya yang berhasil dicapai adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015. Selanjutnya kesepakatan tersebut diperbaharui dengan *SDGs (Sustainable Development Goals)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan hasil pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat dan dihadiri perwakilan dari 193 negara. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa kemiskinan menjadi “tulang punggung” dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bagi Indonesia sendiri kemiskinan juga masih menjadi permasalahan serius. Meskipun secara statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun, tetapi secara kumulatif masih cukup besar dan menjadi beban pembangunan. Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).¹

Secara umum pada periode Maret 2015-September 2019 tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Maret 2016 dan Maret 2018. Akan tetapi angka ini secara kumulatif masih cukup jauh diatas rata-rata Nasional bahkan masih menempati peringkat ke-3 terbesar di Sumatera.

Gambar 1.1
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

¹<https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjek>

Jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2021 mencapai 1,08 juta orang dengan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah pedesaan yaitu sebanyak 14,18 % sedangkan sisanya berada di wilayah perkotaan sebanyak 9,29 %.

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
di Provinsi Lampung Periode Maret 2020 - Maret 2021

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2020	237,10	9,02
September 2020	259,28	9,59
Maret 2021	254,60	9,29
Perdesaan		
Maret 2020	812,22	13,83
September 2020	831,86	14,22
Maret 2021	829,33	14,18
Total		
Maret 2020	1 049,32	12,34
September 2020	1 091,14	12,76
Maret 2021	1 183,93	12,62

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2020, September 2020, Maret 2021

Jika dilihat dari komposisi penduduk di Provinsi Lampung berdasarkan SP2020 mencatat dari total 9 juta lebih penduduk di Provinsi Lampung terdapat 51,25 persen laki-laki dan 48,75 persen perempuan atau terdapat rasio jenis kelamin sebesar 105, yang artinya terdapat 105 laki-laki per 100 perempuan di Provinsi Lampung.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Lampung Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	156 942	145 197	302 139
Tanggaman	331 491	308 784	640 275
Lampung Selatan	544 745	519 556	1 064 301
Lampung Timur	565 743	544 597	1 110 340
Lampung Tengah	747 237	712 808	1 460 045
Lampung Utara	322 935	310 164	633 099
Way Kanan	242 874	230 701	473 575
Tulang Bawang	222 394	207 627	430 021
Pesawaran	246 002	231 466	477 468
Pringsewu	208 763	196 703	405 466
Mesuji	117 509	110 009	227 518
Tulang Bawang Barat	146 355	139 807	286 162
Pesisir Barat	84 717	77 980	162 697
Bandar Lampung	594 292	571 774	1 166 066
Metro	84 806	83 870	168 676
LAMPUNG	4 616 805	4 391 043	9 007 848

Sumber :Sensus Penduduk 2020 BPS

Komposisi penduduk yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan tersebut belum diimbangi dengan kontribusi perempuan pada kegiatan ekonomi yang diukur dengan sumbangan pendapatan perempuan yang menjadi salah satu indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tercatat baru mencapai 29,33 persen, sebagaimana dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Lampung dan
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2018

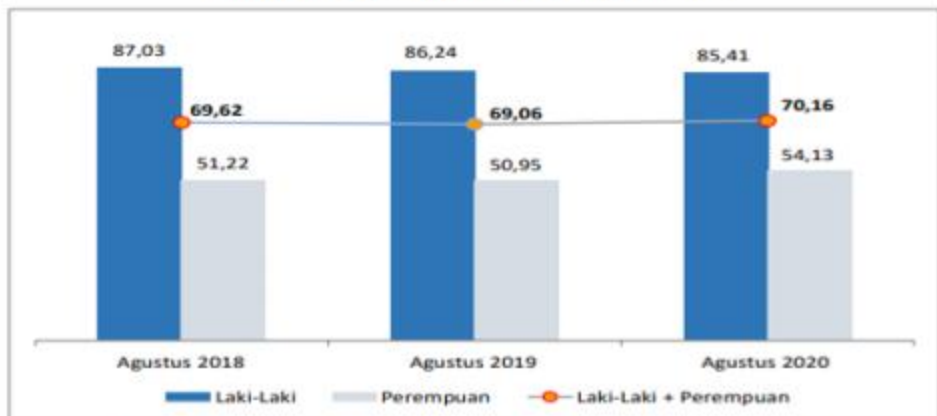
No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
1.	Kota Metro	32,00	53,90	33,44	78,75
2.	Kab. Tanggamus	20,00	52,16	29,51	69,90
3.	Kab. Pesawaran	17,78	46,02	29,94	67,03
4.	Kab. Way Kanan	15,00	58,20	32,93	65,30
5.	Kab. Pesisir Barat	12,00	39,03	33,98	63,90
6.	Kab. Pringsewu	25,00	45,82	20,21	63,81
7.	Kab. Lampung Barat	11,76	49,35	32,53	63,84
8.	Prov. Lampung	14,12	50,48	29,33	63,82
9.	Kab. Tulang Bawang	15,56	49,80	25,94	62,52
10.	Kota Bandar Lampung	12,00	45,34	30,71	62,39
11.	Kab. Mesuji	14,29	45,90	27,28	61,71
12.	Kab. Lampung Utara	8,89	51,19	34,81	61,41
13.	Kab. Lampung Timur	10,00	54,78	32,45	60,73
14.	Kab. Tubaba	10,00	45,69	31,10	59,74
15.	Kab. Lampung Selatan	10,00	58,61	29,40	58,14
16.	Kab. Lampung Tengah	4,00	53,60	31,43	53,52

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2020

Di sisi lain masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara partisipasi perempuan dan laki-laki dalam ketenagakerjaan, salah satu direpresentasikan oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur lima belas tahun ke atas.² Indikator ini merepresentasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Kesenjangan capaian TPAK berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut:

²<https://www.bps.go.id>

Gambar 1.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Lampung, Agustus 2018 – Agustus 2020



Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) tujuan ke-1 “tanpa kemiskinan” terkait erat dengan tujuan ke-5 yaitu “kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan”. Dimanapun, kemiskinan selalu menampilkan wajah perempuan di depan. Banyak peneliti kontemporer mengungkapkan dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga.

Setidaknya ada empat peran perempuan miskin dalam keluarga. *Pertama*, sebagai pengelola keuangan keluarga; *Kedua*, sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik; *Ketiga*, sebagai pencari nafkah keluarga; *Keempat*, sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa-masa kritis dan krisis³.

Dalam realita tak dapat dipungkiri bahwa permasalahan yang sering muncul dalam keluarga disebabkan karena faktor kebutuhan hidup yang belum sepenuhnya terpenuhi. Faktor ekonomi inilah yang kemudian menyebabkan peran yang seharusnya ditopang oleh suami harus dibantu oleh seorang istri, atau bahkan justru istri yang berperan sebagai “kepala keluarga”.

Masyarakat Indonesia mengenal istilah kepala rumah tangga atau kepala keluarga sebagai bagian dari terminologi kependudukan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kepala rumah tangga sebagai orang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dianggap atau ditunjuk sebagai kepala rumah tangga.⁴ Dalam realitas di lapangan, kepala keluarga tidak selalu merujuk pada laki-laki atau suami sebab ada banyak rumah tangga yang kepala keluarganya ialah perempuan, yang disebut perempuan kepala

³Basuki, A. & Prasetyo, Y. E., Memusiumkan Kemiskinan, Surakarta: PATTIRO Surakarta, 2007. Hlm. 10-11

⁴<https://www.bps.go.id>

keluarga. Menurut Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), yang dimaksud dengan perempuan kepala keluarga ialah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, dan pengambil keputusan dalam keluarga.

Jika kita melihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mengurutkan 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2020 terdapat 132.684 Kepala Rumah Tangga Perempuan dari total 999.769 Kepala Rumah Tangga Miskin di Provinsi Lampung atau 13,27 persen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4
Data Persentase Perempuan Miskin Berstatus Kepala Rumah Tangga
di Provinsi Lampung Berdasarkan DTKS Tahun 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kepala Rumah Tangga (KRT) Miskin	KRT Perempuan	Persentase
1	Bandar Lampung	87.772	11.476	13,07%
2	Lampung Barat	33.334	2.935	8,80%
3	Lampung Selatan	146.529	20.258	13,83%
4	Lampung Tengah	131.974	19.221	14,56%
5	Lampung Timur	132.022	19.443	14,73%
6	Lampung Utara	84.216	9.907	11,76%
7	Mesuji	29.335	3.016	10,28%
8	Metro	10.843	1.368	12,62%
9	Pesawaran	65.026	7.974	12,26%
10	Pesisir Barat	20.618	1.656	8,03%
11	Pringsewu	41.272	5.690	13,79%
12	Tanggamus	87.210	9.403	10,78%
13	Tulang Bawang Barat	30.250	4.221	13,95%
14	Tulang Bawang	44.503	9.292	20,88%
15	Way Kanan	54.865	6.824	12,44%
JUMLAH		999.769	132.684	13,27%

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2020

Perempuan kepala keluarga memikul tanggung jawab secara ekonomi bagi keluarganya, sehingga partisipasinya dalam kegiatan ekonomi menjadi satu hal yang sangat penting untuk kesejahteraan keluarganya. Pentingnya memasukkan dimensi keadilan dan kesetaraan gender adalah adanya pengakuan tentang hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan tidak terealisasinya hak-hak orang miskin. Salah satu

hambatan struktural yang menjadi perhatian di sini adalah relasi gender (*gender relation*) yang tidak setara dan tidak adil.⁵

Persoalan lain yang lebih mendasar terletak pada pemilahan secara dikotomis antara peran laki-laki dan perempuan yang secara kokoh dikontraskan pada peran publik dan privat. Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits dan ajaran para ulama pemilahan peran dan lokus secara dikotomis ini berlaku sangat ketat. Perubahan peran perempuan masuk ke sektor publik seperti menjadi pemimpin negara atau pencari nafkah seringkali dianggap sebagai "penyimpangan" atau masuk dalam kategori "darurat".

Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada dalam posisi tawar yang lemah. Sementara itu suara perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Marginalisasi, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak menjadi sebab penting dari parahnya masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Karena itu, pengarusutamaan gender dalam penanggulangan kemiskinan menjadi bagian yang tak terelakkan. Penerapan perspektif gender dalam melihat kemiskinan tidak untuk mengecilkan arti kemiskinan yang dialami laki-laki, tetapi untuk menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami perempuan bersifat spesifik, sehingga dibutuhkan adanya penanganan yang khusus pula.⁶

Jika dilihat dari perspektif kajian isu gender dalam Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan melimpahnya publikasi yang mengangkat wacana gender dan Islam sebagai suatu "kerangka ideologi" pengarusutamaan gender berperspektif Islam, yang merupakan fakta yang meluas ke dalam suatu *mainstream* "gerakan feminisme Islam". Definisi "feminisme Islam" dikalangan aktifis wanita muslim masih mengalami perdebatan serius, tetapi pada tingkat *common vision* dapat diartikan sebagai suatu hal dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.⁷

Dalam Islam, pemberdayaan perempuan merupakan upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik di ranah domestik maupun publik. Pemberdayaan perempuan ini didasarkan pada visi menjadi perempuan unggul sebagai *ummun warobbatul bait* sebagai mitra laki-laki demi melahirkan generasi cerdas, takwa, pejuang syariah, dan khalifah serta kesakinahan keluarga.

Sementara misinya adalah mengokohkan ketahanan keluarga muslim, melahirkan generasi pejuang, membangun muslimah berkarakter, kuat dalam rangka amal makruf, nahi munkar, melahirkan perempuan sebagai mitra laki-laki dalam rumah tangga dan pejuang dimasyarakat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nahl ayat 97 sebagai berikut:

⁵Darwin, Muhadjir, *Memanusiakn Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Benang Merah.2005, hlm. 2

⁶*Ibid*, hlm. 164

⁷Arief Subhan, dkk. *Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003. Hlm. 1.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ajaran Islam lebih terfokus mengikat manusia untuk selalu mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya serta menuntun hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik berkenaan dengan rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Dalam suatu rumah tangga, suami istri harus dapat menciptakan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan untuk semua anggota keluarga. Dengan terciptanya kenyamanan dalam keluarga dipastikan setiap anggota keluarga dapat mengabdikan atau menyumbangkan darma baktinya untuk masyarakat. Perempuan sangat memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga dan Islam memberikan kebebasan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi di masyarakat. Islam mengangkat derajat kemuliaan perempuan dalam setiap perkembangan zaman.⁸

Secara umum yang berperan sebagai penopang kehidupan keluarga adalah suami, hal ini merupakan wujud bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan sebagai firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34 berikut:

الرِّجَالُ قَوٰمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ۗ وَاللّٰتِي تَخٰفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۗ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضٰجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَاِنْ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

⁸Hadijah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994). hlm. 8

Pendekatan keagamaan dalam pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi menjadi salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sangat strategis, baik dari sisi internal yaitu perempuan itu sendiri, maupun dari sisi eksternal yaitu akses, kesempatan dan lingkungan yang mempengaruhi. Berangkat dari keyakinan bahwa pada dasarnya Islam menganut paham keadilan, maka segenap ketidakadilan yang berkembang dalam masyarakat Islam pada dasarnya adalah konstruksi sosial. Tafsiran yang seringkali muncul sebagai jawaban terhadap problem sosial (*asbabun-nuzul*) dari suatu ayat pada saat itu. Oleh karena itu yang diperlukan adalah prinsip dasar hubungan itu yakni keadilan, dan segenap yang melanggar dari prinsip tersebut harus didekonstruksi.

Jika dilihat dari capaian IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota terlihat kesenjangan yang cukup tinggi antar Kabupaten/Kota. Akan tetapi ada hal yang menarik di Kabupaten Pringsewu, secara kumulatif angka IDG Kabupaten Pringsewu sudah di atas capaian angka IDG Provinsi Lampung tetapi untuk indikator sumbangan pendapatan perempuan berada di posisi paling rendah di antara Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Berdasarkan pra survei yang dilakukan ke Kabupaten Pringsewu dengan wawancara terhadap Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (P3AP2KB), Kepala Kantor Kementerian Agama, dan Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Pringsewu diketahui bahwa upaya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, meskipun hasil yang dicapai belum optimal.

Muslimat Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Pringsewu sebagai organisasi kemasyarakatan yang merupakan salah satu Badan Otonom dari Nahdatul Ulama yang berdiri sejak tanggal 29 Maret 1946 merupakan organisasi yang salah satu program prioritasnya adalah pemberdayaan ekonomi perempuan. Partisipasi Muslimat NU dalam pemberdayaan ekonomi perempuan diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengoptimalkan upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian perempuan melalui pendekatan keagamaan. Potensi UMKM Muslimat NU di Kabupaten Pringsewu saat ini belum dikembangkan secara terstruktur dan sistematis, sehingga belum optimal memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan pedesaan. Dalam menjalankan peran dimaksud, menurut Hafiz dan Sungaidi (2021)⁹ maka Muslimat NU perlu memperhatikan modal keunggulan komparatif yang dimiliki para Muslimah yakni modal sosial, modal persatuan, modal untuk menjadi umat terbaik dan modal pemikiran. Prinsip sosial yang harus dipegang Muslimat adalah sikap moderat, seimbang, toleransi dan loyalitas tegak lurus. Demikian pula tentu modal dan prinsip sosial yang harus dikembangkan oleh Muslimat NU Cabang Pringsewu dalam memberdayakan jamaahnya khususnya perempuan pedesaan.

Berangkat dari uraian di atas dan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat secara umum serta masyarakat di Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu secara khusus, disertasi ini memfokuskan pada upaya Pemberdayaan

⁹Abdul Hafiz dan Muh. Sungaidi, Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU, *Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2021, Hlm. 194-208

Perempuan Pedesaan dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam (Studi pada Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Pringsewu). Dengan memperhatikan konsentrasi penduduk miskin yang sebagian besar berada di pedesaan, komposisi penduduk yang hampir berimbang antara perempuan dan laki-laki serta ketimpangan yang cukup besar dalam kontribusi perempuan di sektor ekonomi, maka pemberdayaan perempuan pedesaan menjadi penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Secara kuantitatif jumlah perempuan hampir mencapai separuh jumlah penduduk di Provinsi Lampung. Dalam jumlah tersebut perempuan merupakan kekuatan yang luar biasa dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan dalam kontribusinya di sektor ekonomi. Sehingga diperlukan komitmen bersama terhadap upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perempuan yang menghalangi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, baik dari pihak lain ataupun dari perempuan pelaku ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis yang bisa dijadikan rujukan untuk memperbaiki kondisi tersebut.
2. Ketimpangan akses ekonomi antara perempuan dan laki-laki, banyak disebabkan karena pembagian peran gender dalam rumah tangga yang lebih banyak merugikan perempuan. Sehingga konsep kemiskinan perempuan baik sebagai individu maupun sebagai kepala rumah tangga menjadi hal yang sangat strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
3. Konsentrasi penduduk miskin yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan dimana budaya patriaki masih sangat kental, memerlukan strategi dan pendekatan baru untuk meningkatkan perempuan pedesaan dalam akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka perlu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengembangan masyarakat Islam dalam penelitian ini merujuk kepada pendapat Ibnu Khaldun mengatakan bahwa secara etimologi pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas. Masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam, yang meneliti hubungan dan keterkaitan ideologis yang satu dengan yang lainnya. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan, namun secara kodrati manusia memiliki kekurangan. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun.

- 2) Gender dalam penelitian ini diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Gender bukan merupakan kodrat/takdir Tuhan tetapi berkaitan dengan keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Sehingga gender merupakan suatu konsep budaya pada suatu masyarakat tertentu yang berupaya membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat tersebut.
- 3) Gender dari Perspektif Islam dalam penelitian ini adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang digambarkan oleh ayat-ayat Al-Quran, suami dan istri sebagai hubungan yang saling menyempurnakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan. Hal ini diungkapkan Al-Quran dengan istilah *ba'dhukum mim ba'dhi* – sebagian kamu (laki-laki) adalah sebahagian dari yang lain (perempuan). Istilah ini atau semacamnya dikemukakan kitab suci Al-Quran baik dalam konteks uraiannya tentang asal kejadian laki-laki dan perempuan, dapat dilihat pada surat Ali Imran ayat 195, maupun dalam konteks hubungan suami istri, dapat dilihat pada surat An-Nisa' ayat 21 serta kegiatan-kegiatan sosial, yang juga dapat dilihat pada surat At-Taubah ayat 71. Pada dasarnya semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (*equal*). Oleh karena itu subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba.
- 4) Kesetaraan Gender dalam penelitian ini meliputi kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti: politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki menjadi tanda terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Menurut Naila Kabeer ketimpangan gender merupakan hasil dari relasi sosial yang dapat berubah melalui faktor-faktor seperti perubahan makro atau agen manusia.
- 5) Pemberdayaan Perempuan dalam penelitian ini adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Dalam proses tersebut harus melibatkan empat aktor

secara aktif yaitu keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Dan dalam proses pemberdayaan tersebut akan meliputi (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; (2) tahap transformasi kemampuan; (3) tahap peningkatan kemampuan, dan (4) tahap kemandirian.

- 6) Masyarakat Miskin Pedesaan dalam penelitian mengacu pada pengertian masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. ini adalah. Sedangkan menurut catatan Bank Dunia, tiga perempat dari kaum miskin di dunia adalah petani di pedesaan. Statistik ini mencerminkan tiga dari lima orang Indonesia, yang tinggal di daerah pedesaan dimana pertanian merupakan pekerjaan utama. Banyak dari petani sub sistem ini adalah perempuan yang juga bertanggung jawab untuk tugas-tugas rumah tangga dan dapat dicabut dari pengambilan keputusan dan upah yang sama.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan identifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pemberdayaan perempuan pedesaan pada Muslimat NU Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, yaitu:

1. Bagaimana perspektif Muslimat NU terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan khususnya di sektor ekonomi?
2. Bagaimana strategi dan upaya pemberdayaan perempuan pedesaan yang dilakukan Muslimat NU Kabupaten Pringsewu?
3. Bagaimana dampak upaya pemberdayaan perempuan pedesaan yang dilakukan Muslimat NU Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan akses dan manfaat perempuan di sektor ekonomi?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai faktor terkait pemberdayaan perempuan pedesaan serta menjelaskan perspektif Islam khususnya Muslimat NU terhadap pemberdayaan perempuan. Secara spesifik tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih mendalam tentang kesetaraan gender dalam sektor ekonomi berdasarkan perspektif Muslimat NU.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih mendalam strategi dan upaya Muslimat NU dalam pemberdayaan perempuan pedesaan di Kabupaten Pringsewu.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak upaya pemberdayaan perempuan pedesaan yang dilakukan Muslimat NU Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan akses dan manfaat perempuan di sektor ekonomi.

2. Kegunaan

Filsafat ilmu mendalilkan bahwa ilmu pengetahuan haruslah memiliki 3 (tiga) komponen dasar yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Aspek aksiologi ditunjukkan dengan kegunaan atau manfaat yang diberikan kepada masyarakat luas. Karenanya penelitian ini dimaksudkan turut memberikan kontribusi, baik untuk pengembangan keilmuan maupun aplikasi kebijakan.

a. Kontribusi Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademisi dari teori yang ada terutama ilmu pengembangan masyarakat Islam dan diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran untuk penelitian dan kajian yang lebih mendalam di tentang pengembangan masyarakat Islam, analisis gender dalam perspektif Islam, serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

b. Kontribusi Kebijakan (Praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pemerintah dan masyarakat serta bahan perbandingan dalam pengambilan kebijakan melalui perspektif Islam dalam upaya pemberdayaan perempuan pedesaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu problem pelik yang dihadapi umat manusia. Sebuah hasil survei yang dipublikasikan oleh Sam Mountford (Direktur Riset GlobeScan) melalui BBC pada 17 Januari 2012 menempatkan kemiskinan sebagai masalah paling serius yang dihadapi masyarakat dunia dibanding masalah perubahan iklim, terorisme, dan perang. Penelitian ini dilakukan terhadap 25 ribu orang lebih dari 23 negara.¹

Kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan, sehingga membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia. "...*human rights become a constitutive element of development and human rights violations become both a cause and symptom of poverty*". Chambers sebagaimana dikutip oleh Soetrisno mengemukakan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada *deprivation trap* atau jebakan kekurangan. *Deprivation trap* terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin, yaitu (1) kemiskinan itu sendiri; (2) kelemahan fisik; (3) keterasingan; (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan².

Beberapa ahli mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kemiskinan. Berikut definisi kemiskinan menurut beberapa ahli:

- a. Benyamin White mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainya.³
- b. Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴
- c. Dalam konteks politik, John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksetaraan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuatan sosial.
- d. Emil Salim mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri; 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri; 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah; 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan; 5) di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan

¹<http://www.waspada.co.id/kemiskinan-jadi-masalah-terbesar-dunia>

²Soetrisno, Loekman, *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan. Dalam Dewanta (ed), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Medi, 1995), hlm. 19

³Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 10.

⁴Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 10

yang memadai.⁵

- e. Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

Bentuk-bentuk kemiskinan menjadi beragam ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jika dilihat dari sudut pandang pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi dua antara lain:

- (1) Kemiskinan Absolut

Seorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

- (2) Kemiskinan Relatif

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.⁶

Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyebabnya, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

- (1) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

- (2) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan juga disebabkan oleh faktor-faktor rekayasa manusia.⁷

Sementara itu Effendi membedakan konsep kemiskinan dalam tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial dan politik.

- (1) *Secara ekonomi*, kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya

⁵Supriatna, Tjahya. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. (Bandung: Humaniora Utama Press, 1997), hlm. 82

⁶Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 157.

⁷*Ibid*

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan mentapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada seseorang atau keluarga dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku.

- (2) *Secara sosial*, kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Faktor-faktor penghambat dalam dimensi kemiskinan sosial ini dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Faktor yang datang dari luar kemampuan seseorang, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat mencegah seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada. Kemiskinan tipe ini sering disebut sebagai kemiskinan tipe struktural.
 - b. Faktor yang datang dari dalam diri seseorang, misalnya rendahnya pendidikan atau karena budaya. Kemiskinan tipe ini disebut sebagai tipe kemiskinan kultural.
- (3) *Secara politik*, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihannya sendiri yang memiliki kaitan dengan kepemilikan umum, misalnya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam penentuan suatu program.⁸

Dalam rangka mengentas kemiskinan, Indonesia maupun negara-negara berkembang yang lainnya telah menggunakan teori-teori ekonomi yang ada, baik itu mengadopsi dari pemikiran barat maupun dari nasional sendiri sebagai berikut:

1) Teori ekonomi neoliberal

Munculnya neoliberalisme dilatarbelakangi oleh kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis pada tahun 60-an yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan.⁹ Sehingga, sistem ini mensyaratkan dua hal, pertama meminimalisir intervensi negara dan kedua mengakui kebebasan individu. Pada intinya paham ini memperjuangkan persaingan bebas yakni paham yang memperjuangkan hak-hak kepemilikan dan kebebasan individual. Mereka lebih percaya kepada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah sosial daripada regulasi negara.

Teori ini berhasil menurunkan inflasi dan mendorong perekonomian di beberapa negara. Seperti di Inggris pada pemerintahan Margaret Thatcher yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1979. Begitu juga pada kepemimpinan Ronald Reagan di Amerika Serikat dalam dua periode (1981-1989). Keduanya menerapkan sistem yang sama yakni privatisasi, deregulasi,

⁸Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudera Biru, Cetakan I, November 2012), hlm. 3-4

⁹*Ibid.*, hlm. 50.

serta pengurangan pajak dan subsidi.¹⁰ Kesemuanya ini merupakan ciri dari neoliberalisme.

Kelebihan dari sistem ekonomi neoliberal ini antara lain adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena semua pihak bebas untuk berinvestasi, tidak ada aturan yang mampu membatasi kemampuan investasi. Selain itu daya beli masyarakat ditingkatkan karena adanya stimulus, UMR naik dan kesenjangan sosial diperkecil.

Kelemahannya adalah minimnya kontrol pemerintah sehingga regulasi kurang. Pihak yang lemah akan semakin lemah dan yang kuat akan semakin merajalela. Selain itu, masyarakat menjadi semakin konsumtif dan akhirnya terilit hutang.

2) Teori Ekonomi Pancasila

Teori ekonomi pancasila adalah teori ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Teori ini bercirikan asas keselarasan dan lebih mengutamakan masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang.¹¹ Penggunaan asas kekeluargaan bertujuan untuk meminimalisir persaingan antar masyarakat. Sistem ekonomi yang telah digunakan seperti sistem kapitalis-liberal yang diajarkan oleh Adam Smith, menjadikan masyarakat bersaing secara bebas sehingga menimbulkan dampak kesenjangan sosial dan kemakmuran hanya dinikmati oleh orang-seorang.

Alasan Mubyarto menggunakan asas kekeluargaan adalah karena ia menganalogikan suatu sistem ekonomi sebagai suatu keluarga. Artinya, kemungkinan terjadinya persaingan antar anggota dalam suatu keluarga sangat kecil. Apabila antar anggota sudah mulai mempunyai semangat persaingan, maka pasti akan timbul keretakan hubungan antara yang satu dengan yang lain.¹² Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa persaingan akan tetap terjadi baik persaingan yang diiringi dengan suatu kerjasama maupun persaingan yang murni tanpa diiringi kerjasama.

Kemakmuran secara merata merupakan tujuan diberlakukannya ekonomi pancasila. Para pelaku ekonomi khususnya bagi para penguasa, diharapkan untuk tidak memikirkan kepentingan pribadi. Sistem perekonomian seperti inilah yang kemudian mampu meminimalisir permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

3) Teori Anggaran Pro Kaum Miskin

Anggaran pro kaum miskin adalah penganggaran berdasarkan penilaian kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan yang melibatkan kelompok miskin untuk ikut menentukan skala prioritasnya.¹³ Dalam pengertian lain, anggaran pro kaum miskin dimaknai sebagai sebuah penganggaran yang

¹⁰*Ibid.*, hlm. 51-56.

¹¹Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintas Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 40.

¹²*Ibid.*, hlm. 44

¹³Joe Fernandez, *Anggaran Pro Kaum Miskin: Konsep dan Praktik*, dalam *Anggaran Pro Kaum Miskin: Sebuah Upaya Menyejahterakan Kaum Miskin*, ed. Abdul Waidl dkk, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 15.

ditujukan untuk kemakmuran rakyat khususnya kelompok masyarakat miskin melalui proses yang adil, partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.¹⁴

Teori ini menawarkan solusi penanggulangan kemiskinan dengan bertolak pada akar masalah kemiskinan itu sendiri. Definisi di atas menghasilkan sebuah pandangan yang melihat anggaran negara sebagai instrumen pemberdayaan. Sedangkan proses penganggaran itu sendiri dipandang sebagai proses politik di mana partisipasi kaum miskin mutlak diperlukan, sekalipun demokrasi perwakilan telah berjalan.¹⁵

Untuk dapat memahami anggaran pro kaum miskin ini, tidak hanya soal logika anggaran dan penganggaran, tetapi juga memahami kemiskinan yang memiliki dimensi jauh lebih luas dari pada sekedar pendapatan yang rendah.

Sentralitas peran anggaran dalam kehidupan publik menjadikan penentuan prioritas anggaran sudah semestinya melewati uji publik. Keterlibatan publik akan memberikan pertimbangan rasional untuk menghasilkan program program dan prioritas anggaran yang efisien, tepat sasaran, tepat waktu dan tentu saja legitimasi hukum yang lebih kuat.¹⁶

Dari sekian teori yang ada khususnya teori-teori yang sudah diterapkan, ternyata belum mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang meliputi beberapa negara khususnya di Indonesia. Ketidakberhasilan tersebut bisa saja karena kesalahpahaman dalam pelaksanaan teori. Selain itu, bisa saja karena pada dasarnya sistem itu hanya mampu memperbaiki perekonomian masyarakat yang mempunyai kekuatan untuk meningkatkan perekonomiannya, sedangkan masyarakat yang jauh tertinggal dan tidak mampu mengikuti perjalanan sistem akan semakin tertinggal. Sehingga permasalahan baru yang muncul adalah kesenjangan sosial yang meningkat begitu tajam.

Al-Qur'an menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan kemiskinan, antara lain dengan kata *faqir*, *miskin*, *al-sail* dan *al-mahrum*. Tetapi, kata *faqir* dan *miskin* lebih sering dijumpai di dalam Al-Qur'an, di dalam al-Qur'an kata *faqir* dijumpai 12 kali dan kata *miskin* dijumpai 25 kali, yang masing-masing digunakan dalam pengertian yang berbeda-beda.¹⁷ Namun, Al-Qur'an sendiri tidak memberikan definisi yang rinci untuk istilah-istilah tersebut.

Beberapa kosa kata di dalam Al-Qur'an yang biasanya dimaknai dengan miskin mengindikasikan bahwa miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tersebut membutuhkan pertolongan. Dari pernyataan tersebut, miskin dapat dimaknai sebagai kondisi seseorang yang sedang membutuhkan bantuan dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan akan makan dan minum.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur'an telah menyinggung dalam surat Az-

¹⁴*Ibid.*, hlm. 20

¹⁵*Ibid.*, hlm. 26

¹⁶*Ibid.*, hlm. 20

¹⁷Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 31

Zukhruf ayat 32 sebagai berikut:

أَهْمَرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai “kemiskinan absolut” sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (*kaffah*) ayat-ayat Tuhan tadi.

Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi/peningkatan pendapatan. Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan

pada “menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara. Demikian pula, di dalam mengatasi *problematika* tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Quran surat Ar Ra'd ayat 11 berikut:

لَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

11. bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

2. Ekonomi Keluarga

Keluarga (*families*) dan rumah tangga (*household*) cukup sulit untuk dibedakan, tetapi Bryant and Dick (2006) membedakan berikut; rumah tangga adalah mereka yang tinggal bersama menggunakan sumber daya kolektif untuk mencapai tujuan. Sementara keluarga adalah orang-orang yang memiliki ikatan sosial biologis melalui pernikahan, kelahiran atau adopsi, tidak hidup bersama dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama (kolektif) untuk mencapai tujuan bersama.¹⁸ Keluarga didasarkan atas ikatan perkawinan yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak yang belum menikah, keluarga lazimnya juga disebut rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam proses pergaulan hidup. Dalam suatu keluarga terdapat anggota keluarga, yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Masing-masing anggota keluarga mempunyai kewajiban yang berbeda-beda. Untuk membina keluarga yang bahagia maka semua anggota keluarga harus menunaikan hak dan kewajibannya. Hak harus diterima, sedangkan kewajiban harus ditunaikan, jika ada seorang anggota keluarga tidak menunaikan tugasnya atau tidak menempati fungsinya, maka keselamatan keluarga akan terancam.

Keluarga sebagai sebuah lembaga terkecil, dibangun dari hubungan suami isteri sebagai pendiri pertama. Dari hubungan pendiri pertama tersebut, lahirlah anak-anak yang menjadi anggota lembaga kecil tersebut. Fungsi dan kedudukan keluarga,

¹⁸Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 3

bergantung pada perannya dalam masyarakat. Mengacu pada Soleman (1984), didalam perkembangannya keluarga diharapkan dapat memenuhi fungsinya, yaitu fungsi: biologis, ekonomis, sosial-psikologis dan edukatif.¹⁹ Keluarga sebagai fungsi biologis, lembaga keluarga pada hakekatnya merupakan sebuah lembaga yang memiliki nilai social tinggi, karena didalamnya sangat diharapkan lahirnya keturunan yang akan dapat mewariskan nilai-nilai hidup, status dan kekayaan. Oleh sebab itu, fungsi biologis merupakan hal yang dibanggakan oleh para orang tua atau para wali. Melalui fungsi biologis atau reproduktif para orang tua atau para wali menitipkan kepada suami-isteri itu bersifat sakral, mengingat hal ini sebagai generasi penerus nilai-nilai hidup.

Keluarga sebagai fungsi sosial psikologis, keluarga merupakan kelompok pertama yang dikenal anak dalam hubungan antar manusia, keluarga merupakan anak belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Ibu merupakan salah satu anggota keluarga yang paling dekat hubungannya dengan anak, dengan demikian ibu sebagai memiliki peran penting dalam memonitor tumbuh kembang anak sejak anak lahir di dunia dan selanjutnya pada fase-fase tumbuh kembang berikutnya. Pengalaman interaksi sosial dalam keluarganya, akan menentukan cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial di luar keluarganya dan masyarakat pada umumnya. Apabila interaksi sosialnya di dalam kelompok-kelompok karena beberapa sebab tidak lancar atau tidak wajar, maka kemungkinan besar interaksi sosialnya dengan masyarakat pada umumnya juga akan berlangsung tidak lancar atau tidak wajar. Jadi selain peran umum keluarga sebagai kerangka sosial yang pertama tempat manusia berkembang sebagai mahluk sosial, terdapat pula peran-peran tertentu di dalam keadaan-keadaan keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan individu sebagai mahluk sosial. Mengacu pada Gerungan (2004) bahwa, peranan-peranan tertentu di dalam keadaan-keadaan keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan individu sebagai makhluk sosial adalah: status sosio-ekonomi, keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua, status anak.²⁰

Keluarga sebagai fungsi ekonomis, keluarga merupakan sebuah kesatuan yang berfungsi ekonomis, artinya bahwa suami-isteri memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kewajiban sebagai pelindung dan pencari nafkah keluarga. Dalam upaya mencukupi kebutuhan keluarganya, suami sering bersama isteri berusaha mencari pemenuhan kebutuhan hidup. Di banyak masyarakat, fungsi ekonomis dalam keluarga terutama dalam hal pemenuhan akan pangan, sandang dan beberapa kebutuhan material lainnya. Hal ini tergantung kepada pola hidup dalam keluarga masing-masing, yang terkait dengan penetapan status dalam keluarga itu sendiri, misal: pendidikan, kekayaan dan sebagainya.

Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya. Kajian tentang ekonomi keluarga difokuskan pada pembahasan tentang berbagai keinginan yang tak terbatas (*unlimited*) diantara anggota keluarga, dihadapkan pada terbatasnya

¹⁹Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: UNNES Press, 2017), hlm.17

²⁰Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: UNNES Press, 2017), hlm.19

sumber daya yang dimiliki keluarga. Pembahasan kajian ekonomi keluarga memfokuskan pada sumber daya yang digunakan pada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan keluarga pada saat jumlah sumber daya yang dapat dipergunakan terbatas. Pada saat keluarga hidup dalam situasi kelangkaan sumber daya, maka keluarga harus mengetahui cara menggunakan sumber daya dan menentukan pilihan yang bijaksana. Kelangkaan sumber daya berdampak besar pada setiap pengambilan keputusan yang akan dan telah dibuat oleh keluarga.²¹

Dalam ekonomi dijelaskan bahwa “unsur-unsur yang ada dalam ekonomi keluarga adalah penghasilan, pengeluaran dan cara mengatur ekonomi keluarga”. Penghasilan keluarga merupakan sumber untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

- 1) Wiraswasta sebagai pedagang, pengusaha
- 2) Bekerja di industri/pabrik sebagai pegawai, pegawai negeri, pegawai swasta atau buruh.
- 3) Penghasilan dari tanah atau sawah, kebun atau rumah atau tempat tinggal.

Ekonomi keluarga merupakan suatu kajian tentang manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas yang dilakukan dalam keluarga. Ekonomi keluarga yang tinggi akan memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas keluarga antara lain:

- a) Semakin tinggi tingkat ekonomi keluarga semakin mudah baginya melengkapi kebutuhannya.
- b) Terpenuhinya kebutuhan keluarga, kemakmuran dan kesejahteraan keluarga.
- c) Keluarga yang memiliki ekonomi yang tinggi bisa melanjutkan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi.
- d) Dengan ekonomi yang tinggi semua kebutuhan akan tercapainya kemakmuran keluarga dan kesejahteraan keluarga dalam rumah tangga.

Ekonomi keluarga juga merupakan suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Dengan indikator:

- a) Pendapatan
- b) Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan
- c) Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang dan Papan
- d) Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan

Berdasarkan penelitian Tindangen dkk (2020)²², membuktikan bahwa usaha dan kinerja perempuan yang berada di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur sangatlah membantu akan pendapatan dalam keluarga, walaupun pekerjaan yang mereka lakukan merupakan salah satu pekerjaan yang berat untuk kalangan perempuan sebagai petani sawah, namun tidak membuat mereka putus asa dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang mereka pikirkan hanyalah kebutuhan hidup boleh terpenuhi, ekonomi keluarga menjadi lebih baik dan dapat menyekolahkan anak-anak mereka. Penelitian lain oleh Mashitoh dkk (2016) kesimpulannya bahwa kurangnya kesadaran

²¹Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 8

²²Megi Tindangen, Daisy S. M Engka, Patric C. Wauran, Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 20 No. 03 Tahun 2020, hlm. 79-87

akan pentingnya pengelolaan ekonomi yang baik, seperti pentingnya menabung, mengurangi hutang sampai menghilangkan kebiasaan belanja yang sebenarnya bukan kebutuhan maka pengelolaan keuangan perlu dibangun dan dimasyarakatkan agar tercapai tujuan keluarga sejahtera. Dengan pengelolaan keuangan dan usaha untuk mensiasati kebutuhan maka masalah keuangan dalam keluarga bisa terselesaikan dengan baik. Tidak jarang masalah keuangan menjadi sumber gejala rentannya hubungan dalam keluarga. Karena pada prinsipnya pengelolaan ekonomi merupakan alat yang berguna untuk mengubah perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas.²³

Berikutnya terkait “status ekonomi keluarga”, bahwa status berarti keadaan atau kedudukan (orang, badan) dalam berhubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara) di masyarakat istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin, keluarga berarti ibu bapak dan anak-anaknya satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Status sosial pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam konteks ini Soekanto mengutip keterangan Aris Toteles: “Bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya”. Ucapan demikian sedikit banyak membuktikan bahwa di zaman itu, mempunyai kedudukan yang bertingkat-tingkat dari bawah ke atas. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun dengan sengaja untuk mengejar tujuan bersama. Secara teoritis semua manusia di anggap sama sederajat, akan tetapi sesuai dengan kenyataannya hidup kelompok-kelompok sosial halnya tidak demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses-proses lapisan masyarakat didapatkan pokok-pokok tersebut dijadikan pedoman:

- a) Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan di dalam masyarakat. Sistem tersebut mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan.
- b) Sistem lapisan yang dapat di analisis dalam ruang lingkup unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Distribusi hak-hak istimewa seperti halnya kekayaan, keselamatan, penghasilan wewenang dan sebagainya.
 - 2) Sistem pertentangan yang diciptakan masyarakat.
 - 3) Kriteria sistem pertentangan yaitu di dapat dari kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu.
 - 4) Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi.
 - 5) Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan.
 - 6) Solidaritas di antara kelompok-kelompok individu yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat.

²³Fitria Nur Masithoh, Hari Wahyono, Cipto Wardoyo, Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga dalam Memajukan Kesejahteraan, *National Conference On Economic Education Agustus 2016*, hlm. 530-542

Adapula yang menggunakan istilah kelas hanya pada lapisan yang berdasarkan pada sistem ekonomi dan lapisan yang berdasarkan kehormatan di dalam masyarakat. Max Weber mengadakan pembedaan antara dasar ekonomis dan dengan dasar kedudukan sosial akan tetapi tetap menggunakan istilah kelas dalam semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya lagi dalam sub-sub kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Di samping itu Max Weber juga masih menyebutkan golongan kehormatan khusus dari masyarakat yang dinamakan *Stand*. Josep Schumpeter mengatakan bahwa: terbentuknya kelas-kelas dalam masyarakat adalah karena di perlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Maka kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila di ketahui riwayat terjadinya.

Dengan demikian mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat, akan tetapi wujudnya dalam masyarakat juga berlainan. Karena tergantung pada bentuk dan kebutuhan masing-masing masyarakat, jelas bahwa kedudukan peranan yang di anggap tertinggi. Tak banyak individu yang mempunyai persyaratan demikian, bahkan mungkin hanya segolongan kecil dalam masyarakat. Maka oleh sebab itu pada umumnya warga lapisan atas (*upper-class*) tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan lapisan menengah (*middle-class*) dan lapisan bawah (*lower-class*). Gambaran sederhana di atas merupakan gejala umum yang kadangkala mempunyai pengecualian. Wujud sistem lapisan dan jumlahnya dalam masyarakat tergantung dari penyelidik yang meneliti suatu masyarakat tertentu.

Kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda di dalam bermasyarakat, terdapat beberapa lapisan yaitu ekonomi mampu, ekonomi sedang dan ekonomi keluarga tidak mampu.

a) Ekonomi Keluarga Mampu

Suatu kenyataan yang tidak bisa di sangkal lagi bahwa ekonomi merupakan faktor yang menentukan perilaku seseorang di dalam masyarakat dan juga lingkungannya. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas ekonomi yang dapat dikatakan ekonomi keluarga mampu dibandingkan dengan ekonomi keluarga yang lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari ekonomi keluarga mampu berbeda dengan ekonominya dengan ekonomi keluarga dibawahnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan antara kelas ekonomi keluarga mampu dan ekonomi keluarga lemah. Akhirnya menyebabkan perbedaan antara keluarga mampu dan keluarga kurang mampu berdasarkan tingkat ekonomi keluarganya.

Marx mengatakan; selama masyarakat masih terbagi ke dalam kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah yang akan terhimpun segala kekuasaan dan kekayaan. Hukum, filsafat, agama dan kesenian merupakan refleksi dari status ekonomi tersebut. Namun demikian, hukum-hukum perubahan berperan baik dalam sejarah sehingga keadaan tersebut dapat berubah baik dengan adanya revolusi. Akan tetapi ketika masih ada kelas yang berkuasa maka tetap terjadi eksploitasi terhadap kelas yang lebih lemah.

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi, yaitu suatu keadaan bahwa keluarga merupakan suatu sosial yang mandiri, yang di situ anggota keluarganya mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya. Dalam konteks ini keluarga

membutuhkan dukungan dana atau keuangan yang mencukupi kebutuhan produksi keluarga. Ini dikarenakan keluarga juga berfungsi sebagai pendidikan bagi seluruh keluarganya, memberikan pendidikan kepada anak-anak dan remaja.

Yang lebih pada masyarakat itu lebih memudahkan keluarga yang mempunyai ekonomi keluarga mampu dibandingkan dengan status ekonomi yang berada dibawahnya. Selain itu mereka mempunyai banyak kemudahan-kemudahan akibat dari dukungan perekonomian yang mapan di dalam mencukupi kebutuhannya dan juga di dalam mendidik anak-anaknya. Ukuran atau kriteria yang bisa di pakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran-ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar sistem lapisan dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional orang yang membuka tanahlah yang mempunyai kelas paling tinggi, keturunan dan kerabat pembuka tanah di anggap masyarakat desa sebagai kelas tertinggi. Lapisan atasan masyarakat tertentu dalam istilah sehari-hari dinamakan elit. Dan biasanya lapisan golongan atas merupakan golongan kecil dalam masyarakat dan juga mengendalikan masyarakat. Kekayaan dapat dijumpai dalam masyarakat ini dan di anggap sebagai hal yang wajar.

b) Status Ekonomi Keluarga Sedang

Status yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, didalam golongan ini seseorang tidak berlebihan di dalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Status mereka dapat berkomunikasi baik dengan status di atasnya juga dapat berkomunikasi baik dengan status di bawahnya. Di dalam tingkatan ini jarang ditemui masalah yang menonjol di dalam berkomunikasi dengan status yang lainnya. Sebagaimana di kemukakan W.A. Gerungan, tingkah laku yang tidak wajar paling sedikit dialami oleh anak-anak yang berlatar belakang sosial ekonomi menengah. Ini menunjukkan kelas ekonomi sedang dapat berkomunikasi dengan baik dengan status ekonomi yang lain hal ini menyebabkan kelas ini tidak ada permasalahan yang mendasar di dalam psikologis anak di dalam bergaul. Ukuran status keluarga sedang tidak terlalu menonjol dibandingkan status-status yang ada di atasnya disebabkan status ini terlalu banyak di dalam lingkungan masyarakat. Status ini dapat ditentukan oleh lingkungan yang bersangkutan. Pada

dasarnya status keluarga ini dapat memenuhi kebutuhannya seperti kebanyakan keluarga lainnya, hanya saja yang membedakannya adalah tingkatan fasilitas yang digunakan berbeda dengan fasilitas ekonomi di atasnya. Tapi mereka di tinjau dari sudut kelayakan mereka masih layak untuk hidup dengan orang-orang pada umumnya. Di dalam karyanya Durkheim menyatakan bahwa: unsur baku dalam masyarakat adalah adalah faktor solidaritas, dia membedakan antara masyarakat-masyarakat yang bercirikan faktor solidaritas mekanis dan memiliki solidaritas organis. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis, warga-warga masyarakat belum mempunyai diferensiasi pembagian kerja. Sedangkan masyarakat organis sudah mempunyai pembagian kerja yang ditandai dengan derajat spesialisasi tertentu.

c) Ekonomi Keluarga Tidak Mampu

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin) biasanya status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga daerah pemukiman masyarakat yang tertinggal. Akibat dari kemiskinan sangatlah berdampak pada kehidupan manusia, terutama pada pendidikan dan juga mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan sangatlah banyak menyebabkan anak-anak bekerja membantu keluarganya di dalam mencukupi kebutuhannya, padahal mereka masih diwajibkan di dalam mencari pendidikan. Akibat dari kemiskinan banyak anak-anak putus sekolah.

Sangatlah buruk bagi perkembangan masyarakat, keterbelakangan akibat masyarakat tidak dapat memperoleh pendidikan merupakan efek dari kemiskinan. Kondisi keluarga ekonomi lemah sangatlah tidak menguntungkan bagi kehidupan keluarga, maka dari itu kemiskinan harus segera ditangani dengan serius, agar masa depan kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus di cari dalam budaya malas bekerja. Sementara itu keterbatasan wawasan, kurangnya keterampilan dan kurangnya kesehatan dan etos kerja yang buruk, semuanya merupakan faktor internal. Dan faktor eksternal yaitu kesehatan yang buruk, rendahnya gizi masyarakat mengakibatkan rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam.

Ada sejumlah teori yang di kolaborasi berkaitan dengan kemiskinan dan kelas sosial, teori-teori tersebut ringkasannya dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu yang berfokus dalam pada tingkah laku individu dan teori mengarah pada struktur sosial. Teori tingkah laku merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi dan kapital manusia. Secara keseluruhan teori dalam kategori ini tersajikan dengan baik dalam teori ekonomi neo klasik. Pandangan strukturalis yang bertolak belakang dengan pendapat di atas diawali dengan baik oleh teori kelompok Marxis, yaitu bahwa hambatan-hambatan struktural yang sistematis telah menciptakan ketidaksamaan dalam kesempatan dan berkelanjutannya penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis.

Singkatnya teori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan. Di sisi lain, teori struktur sosial melihat bahwa kondisi miskinlah yang mengakibatkan perilaku tertentu pada setiap individu yaitu munculnya sikap individu yang tidak produktif merupakan akibat dari adaptasi dengan keadaan miskin. Pada tingkat ekstrim pada kedua model teori tersebut bersifat sangat normatif, teori perilaku individu melakukan tuduhan moral bahwa orang yang tidak produktif dikarenakan mereka lemah di bidang kualitas, latihan, moralitas dan mereka harus bangkit dan berbuat lebih baik. Di pihak lain teori struktural menilai bahwa stuktur sosial yang ada saat ini tidak adil terhadap kelompok miskin sehingga harus di rubah. Teori struktural lebih memfokuskan pada penyebab struktural dari pada masalah kemiskinan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep yang relatif baru, dimana masyarakat tidak lagi hanya dijadikan obyek dalam pembangunan tetapi juga dijadikan

subyek dari pembangunannya sendiri.²⁴ Di sini pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan alternatif atau pembangunan sosial yang bertujuan menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan.²⁵

Suparjan & Suyatno menyatakan bahwa model pembangunan alternatif pada hakekatnya memandang bahwa terjadinya kemiskinan dan keterbelakangan bukan disebabkan masyarakat bodoh dan tidak memiliki kemampuan, akan tetapi ketidakberdayaan terjadi akibat ketidakmampuan masyarakat terhadap tekanan struktural yang disebabkan oleh model pembangunan pertumbuhan yang mengabaikan hak-hak kemanusiaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa meskipun berkembang pemikiran kearah pembangunan yang berkeadilan tetapi pertumbuhan tetap diperlukan. Untuk itu diperlukan upaya untuk memadukan konsep pertumbuhan dan pemerataan yang melahirkan model yang disebut pemerataan dengan pertumbuhan yang dikembangkan berdasarkan studi yang disponsori Bank Dunia (Chenery, 1974). Ide dasarnya, pemerintah harus mempengaruhi pola pembangunan sedemikian rupa sehingga produsen yang berpendapatan rendah (yang dibanyak Negara berlokasi di pedesaan dan produsen kecil di perkotaan) akan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan dan secara simultan menerima sumber ekonomi yang diperlukan.²⁶

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai berkembang sekitar dekade 1970-an dan semakin populer memasuki awal abad ke-21. Konsep ini dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran yang banyak dikenal dengan aliran *post modernisme* yang titik berat sikap dan pendapatnya adalah anti sistem, anti struktur dan anti determinisme kepada dunia kekuasaan.²⁷

Penggunaan istilah pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan paradigma pembangunan masyarakat (*community development*) yang muncul dari kritik terhadap paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi, yang dikemukakan oleh Jim Ife, sebagai berikut *Empowerment means providing people with the resource, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community. Empowerment should be aim of all community development.*²⁸ Pendapat tersebut mengemukakan bahwa pemberdayaan memiliki arti mendekatkan masyarakat pada sumber-sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan mereka dan untuk berperan serta di dalamnya, juga memberikan pengaruh pada kehidupan di komunitasnya. Oleh sebab itu pemberdayaan merupakan alat dari seluruh pembangunan masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power*

²⁴Ginjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (PT. Pustaka Cidesindo; Jakarta, 1996), hlm. 151

²⁵Wrihatnolo & Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 67

²⁶Suparjan & Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), hlm. 4

²⁷Prijono, O.S., Pranarka, A.M.W, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (CSIS. Jakarta, 1996), hlm. 44

²⁸Ife, Jim, *Community Development: Creating Community Alternatives: Vision, Analysis, and Practice*, (Australia, Longman, 1995), hlm. 5

(kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²⁹

Dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Effendy (2002) mengandung makna tiga pengertian yaitu *enabling*, *empowering*, dan *maintaining* sebagai berikut:³⁰

1. *Enabling*, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan.
2. *Empowering*, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial.
3. *Maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Tahap-tahap dalam pemberdayaan yaitu:³¹

- a. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).³² Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

²⁹Ibid, hlm. 58

³⁰Effendy, Onong Uhcjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 314-315

³¹Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 83

³²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), Cet. Ke-2, hlm. 75

1. Kelompok lemah secara struktural, naik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.³³

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.³⁴

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.³⁵

Terdapat empat prinsip pemberdayaan yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu:³⁶

(1) Kesetaraan

Merupakan prinsip utama dari proses pemberdayaan. Kesetaraan disini adalah adanya kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

(2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan di evaluasi oleh masyarakat. Makna partisipasi dalam pembangunan atau pemberdayaan menurut Asngari adalah individu atau masyarakat secara aktif terlibat dalam.³⁷

- a) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
- b) Keterlibatan dalam pengawasan

³³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Ptevika Aditam, 2005) Cet Ke-1, hlm. 60

³⁴Ibid, hlm. 60

³⁵Agus Ahmad Syafi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001), hlm.39

³⁶Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International – IP, 2005), hlm. 54-60

³⁷Anityas Dian Susanti, *Pola Partisipasi Warga dalam Pengembangan Desa Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang*, (Universitas Diponegoro: ISSN: 0853-2877, Vol.15 No.1 Januari-Juni 2015), hlm. 48

- c) Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan.
 - d) Partisipasi sebagai proses pemberdayaan
 - e) Partisipasi bermakna kerja kemitraan.
- (3) Keswadayaan atau Kemandirian
- Prinsip kemandirian adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.
- (4) Keberlanjutan
- Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang.

Pemberdayaan merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam Al Qur'an dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara di antaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُمْ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

11. bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dari ayat diatas sangatlah jelas Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.³⁸

4. Gender, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan

Gender berasal dari kata "gender" dalam bahasa Inggris, yang diartikan sebagai jenis kelamin. Namun, jenis kelamin di sini bukan seks secara biologis, melainkan

³⁸Tomi Hendra, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran*, (Hikmah Vol. XI, No. 02 Desember 2017, 30-50), hlm. 48

sosial budaya dan psikologis. Pada prinsipnya, konsep gender fokus pada perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial masyarakat yang bersangkutan. Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrati. Oleh karena itu, pembagian peranan antara laki-laki dan perempuan dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya sesuai dengan lingkungan atau budaya. Peran gender juga dapat berubah dari masa ke masa karena pengaruh kemajuan teknologi, ekonomi dan lain-lain. Hal ini berarti, peran gender dapat ditukarkan antara laki-laki dengan perempuan.

Dalam perkembangan gender berikutnya dikenal ada tiga jenis peran gender yaitu peran produktif, peran reproduktif, dan peran sosial. Peran produktif yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik yang dikonsumsi maupun yang untuk diperdagangkan. Peran reproduktif yaitu peran yang dijalankan manusia untuk kegiatan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan rumah tangga. Peran sosial yaitu peran yang dilaksanakan seseorang dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

Sesuai dengan konsep gender atau peran gender sebagaimana, mencakup peran produktif, peran reproduktif dan peran sosial yang sifatnya dinamis. Dinamis dalam arti, dapat berubah atau diubah sesuai dengan perkembangan keadaan, dapat ditukarkan antara laki-laki dengan perempuan dan bisa berbeda lintas budaya. Mengupayakan peranan perempuan dalam pembangunan yang berwawasan atau perspektif gender, dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau mitra sejajar yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan di dalam pembangunan. Karena, dalam proses pembangunan kenyataannya perempuan sebagai sumber daya insan masih mendapat perbedaan perlakuan (diskriminasi). Terutama, jika perempuan bergerak di sektor publik dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada pula ketimpangan gender yang dialami oleh laki-laki. Untuk mewujudkan mitra sejajar yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan tersebut, perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau saling menghormati, saling membutuhkan, saling membantu, saling peduli dan saling pengertian antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian, tidak ada pihak-pihak (laki-laki atau perempuan) yang merasa dirugikan dan pembangunan akan menjadi lebih sukses. Usaha-usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sesungguhnya sudah lama dilakukan oleh berbagai pihak, namun masih mengalami hambatan. Kesetaraan dan keadilan gender masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu pemerintah telah mengambil kebijakan, tentang perlu adanya strategi yang tepat yang dapat menjangkau keseluruhan instansi pemerintah, swasta, masyarakat kota, masyarakat desa dan sebagainya. Strategi itu dikenal dengan istilah pengarusutamaan gender, berasal dari bahasa Inggris *gender mainstreaming*. Strategi ini tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dengan pengarusutamaan gender itu, pemerintah dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan

responsif gender kepada seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan strategi itu juga, program pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih sensitif atau responsif gender. Hal ini pada gilirannya akan mampu menegakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban laki-laki dan perempuan atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat.

Di Indonesia, gerakan feminis untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah diperjuangkan sejak lama. Akan tetapi hingga kini, cita-cita untuk menciptakan dunia yang egaliter bagi sesama manusia, laki-laki dan perempuan, belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sosialisasi gender yang bias ini tidak hanya dilakukan oleh budaya, melainkan juga diperkuat oleh agama. Kemudian lahirnya konsep feminisme Islam tiada lain adalah respon mereka (pegiat feminis Islam) karena melihat adanya beberapa kekeliruan dalam konsep Feminisme Barat, yaitu tuntutan penyamaan secara total dengan laki-laki, yang kemudian menyebabkan lahirnya berbagai macam masalah, seperti banyaknya perempuan yang enggan hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya, mereka juga enggan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang dianggapnya sebagai simbol penjajahan laki-laki. Konsep feminisme Islam menolak hal itu, fokus memperjuangkan hak-hak perempuan di ranah sosial. Menuntut adanya kesempatan yang sama dalam mengaktualisasikan segenap potensi disegala bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik. Namun, juga tidak memberikan kecaman bagi perempuan yang hanya sibuk dengan urusan rumah tangga.³⁹

Peran ganda perspektif feminis muslim berdasarkan tipologinya yaitu feminis muslim konservatif, feminis muslim liberal dan feminis muslim moderat. Feminis muslim konservatif memiliki pandangan tentang peran ganda bahwa “mungkin” diperbolehkannya perempuan peran ganda dengan catatan tidak mengabaikan peran domestik dan tugas-tugas spesifik yang diemban oleh perempuan. Feminis muslim moderat memandang perempuan yang berperan dalam ranah publik memang memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Namun perempuan pada peran domestik memiliki tanggung jawab yang penting pula. Kemudian feminis muslim liberal berpandangan tentang peran ganda ialah peran publik bagi perempuan sebagai keniscayaan dari persamaan hak, namun peran ganda yang berarti beban ganda tidak setuju, bahkan ditolak.

Konsep mengenai pemberdayaan perempuan (*women's empowerment*), mulai muncul dalam diskursus para feminis di dunia ketiga sejak tahun 1980-an, seiring dengan kritik mereka terhadap konsep-konsep modernisasi dan pembangunan. Dimulai dari Ester Boserup yang mengkritisi pendekatan kesejahteraan sebelum tahun 1970-an. Dalam bukunya *Woman's Role in Economic Development* (1970) Boserup menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan modernisasi di pedesaan di negara-negara dunia ketiga (Asia, Afrika, Latin Amerika) tidak serta merta memberikan keuntungan dan manfaat yang sama terhadap perempuan dan laki-laki, dimana perempuan banyak ditinggalkan dalam proses produksi digantikan dengan mesin,

³⁹Zahra Zaini Arif, Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Pespektif Feminis Muslim Indonesia, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Juni 2019: hlm. 97-126

menerima upah yang sangat rendah di sektor non-pertanian di daerah perkotaan, dan bahkan tidak dihargai pekerjaan mereka di pedesaan.⁴⁰

Kemudian, kritik para feminis terhadap pembangunan ekonomi semacam itu diterjemahkan dalam upaya mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan melalui pendekatan *Women in Development* (WID) sejak tahun 1970an. Pengadopsian WID ditandai pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB pertama tentang perempuan di Mexico tahun 1975, yang memperkenalkan term *Women in Development* (WID) untuk memastikan integrasi perempuan dalam pembangunan. Namun demikian, Caroline Mosser mencatat bahwa pendekatan anti kemiskinan (*anti-poverty approach*) yang dipakai dalam WID untuk mencapai kesetaraan gender, lebih menekankan pada upaya mengurangi kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki karena dipercaya bahwa sumber ketidakadilan adalah kemiskinan dan bukan sub-ordinasi.⁴¹ Menurut Geeta Chowdhry (1995) pendekatan anti kemiskinan dalam WID lebih difokuskan pada peran reproduksi perempuan, untuk perempuan pedesaan di dunia ketiga yang lekat dengan peran dan posisi konvensional perempuan sebagai istri atau ibu di rumah.⁴² Jadi, WID justru tidak mengintegrasikan perempuan dalam modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi malah meminggirkan perempuan.

Maka, melihat kecenderungan ini, para feminis di negara-negara dunia ketiga di Selatan (Global South Asia, Afrika, Latin Amerika) yang tergabung dalam *Development Alternatives with Women for a New Era* (DAWN) menyerukan agar WID diganti dengan *Gender and Development* (GAD)⁴³ untuk mengintegrasikan kepentingan perempuan dalam modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun ternyata pendekatan anti-kemiskinan masih tetap digunakan. GAD berfokus pada hubungan politik atau relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki upaya untuk meningkatkan kuasa sosial politik perempuan dengan membenahi ketimpangan relasi tersebut.⁴⁴

Dalam perkembangannya sejak tahun 1980an, lembaga-lembaga donor internasional menggunakan kata 'gender dan pembangunan' termasuk kemudian merebak dalam term pemberdayaan perempuan (*women's empowerment*) menggambarkan spirit yang lebih politis untuk melakukan transformasi, menentang struktur patriarki yang membelenggu peran dan posisi perempuan di negara-negara

⁴⁰Ester Boserup, *Woman's Role in Economic Development* (Great Britain: George Allen and Unwin, 1970); baca juga Barbara Rogers, *The Domestication of Women: Discrimination in Developing Societies* (London and New York: Routledge, 1980); Irene Tinker (ed.), *Persistent Inequalities: Women and World Development* (New York: Oxford University Press, 1990).

⁴¹Caroline Mosser, *Gender Planning in the third World: Meeting Practical and Strategic Needs*, dalam Rebecca Grant and Kathleen Newland (eds.), *Gender and International Relations* (Suffolk: Open University Press, 1991), hlm. 101.

⁴²Geeta Chowdhry, *Engendering Development: Women in Development (WID) in International Development Regimes*, dalam Marianne H. Marchand and Jane L. Papart (eds.), *Feminism/Postmodernism/Development* (London and New York: Routledge, 1995), hlm 32.

⁴³DAWN adalah forum kerjasama dan komunikasi antara perempuan di negara-negara dunia yang menyadari bahwa WID justru meminggirkan perempuan. Lihat DAWN, "Rethinking Social Development: DAWN's Vision," *World Development* 23, no.11 (1996).

⁴⁴Kathryn Robinson, *Indonesian Women's Rights, International Feminism and Democratic Change*, *Communal/Plural* 6, no.2 (1998), hlm 212.

dunia ketiga.⁴⁵

Dalam perkembangan kekinian, kaum feminis khawatir dengan penggunaan istilah 'pemberdayaan perempuan' yang dalam praktiknya seringkali sekedar dimaknai sebagai upaya memobilisasi perempuan (umumnya) kelas bawah melalui program-program swakarsa untuk meningkatkan taraf ekonomi, partisipasi, tetapi tanpa memberikan kuasa untuk menentang narasi dominan dari pembangunan atau merumuskan jalan alternatif.⁴⁶

Diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri pemiskinan terhadap perempuan oleh ideologi gender patriarki memposisikan perempuan sebagai anggota masyarakat yang tidak beruntung dan kerap mengalami ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka ide utama pemberdayaan perempuan bermula dari konsep pengarusutamaan gender, kesetaraan gender, dan keadilan.

Mayoux mengungkapkan bahwa pengarusutamaan gender sebagai berikut; "*Making women's concerns and experiences integral to the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and social spheres*"⁴⁷. Lebih lanjut Mayoux mengungkapkan bahwa kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi di mana perempuan memperoleh keadilan dan kesempatan yang sama, dan gender tidak lagi menjadi dasar diskriminasi dan ketidakadilan di antara masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Sen yang mengungkapkan bahwa perempuan sebagai *agent of change* memiliki peranan penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.⁴⁸

Naila Kabeer merumuskan bahwa pemberdayaan perempuan (*women's empowerment*) adalah proses dimana seseorang (perempuan) yang semula tidak memperoleh kesempatan melakukan pilihan strategis dalam hidupnya, kemudian mampu menguasai kemampuan tersebut.⁴⁹ Dalam pemberdayaan yang ditawarkan oleh Kabeer, aktor-aktor dalam pemberdayaan bukan hanya perempuan setempat sebagai *client*, namun juga organisasi perempuan sebagai *agent*. Hal ini mengapa pemberdayaan Kabeer lebih disebut tindakan kolektif. Kabeer juga menjelaskan, tiga dimensi pemberdayaan perempuan, yaitu: pertama, '*resources*' (*pre-condition*) meliputi tidak hanya sumber daya material tetapi juga sumber daya manusia, jaringan hubungan sosial dalam keluarga, pasar, masyarakat; sumber daya merupakan kondisi-kondisi bagaimana pilihan-pilihan dalam pemberdayaan dibuat. Membahas mengenai sumber daya, seringkali dikaitkan dengan sumber daya yang bersifat aktual yaitu sumber daya ekonomi, yang dapat dilihat melalui pendapatan serta pengeluaran informan, namun

⁴⁵Srilatha Batliwala, *Taking the Power out of Empowerment: An Experiential Account*, Development in Practice, vol. 17, no. 4/5 (August 2007), hlm.558

⁴⁶Elliot (2008) sebagaimana dikutip dari Manisha Desai, *Hope in Hard Times: Women's Empowerment and Human Development*, United Nations Development Programme, Human Development Research Paper 2010/14, July 2010, hlm. 4.

⁴⁷Mayoux, Linda, *Gender Equity, Equality and Women's Empowerment. Principle, Development and Framework*. (Aga Khan Foundation, 2001), hlm. 6

⁴⁸Sen, Amartya. *Development as Freedom*. (New York: Anchor Books, 1999), hlm. 12

⁴⁹Naila Kabeer, *Resource, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*, (Development and Change, Vol. 30, 1999), hlm. 437-438.

sejatinya juga termasuk sumber daya sosial, berkaitan dengan tingkat pendidikan partisipasi, selain itu modal sosial yang menentukan *agency* seseorang. Posisi perempuan dalam rumah tangga maupun masyarakat juga merupakan sumber daya, keterlibatan perempuan dengan aktivitas peningkatan pendapatan merupakan salah satu meningkatkan posisi perempuan dalam rumah tangga, pun demikian dengan seberapa keterlibatan perempuan, dalam organisasi perempuan juga mempengaruhi posisi perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Seseorang yang memiliki posisi dia mempunyai hak istimewa untuk menentukan peraturan, norma serta kesepakatan sehingga pemberdayaan yang dilakukan menghasilkan dampak. Sumber daya dalam makna yang lebih luas diperoleh melalui banyak cara seperti hubungan sosial yang terbentuk dalam beragam institusi yang membentuk masyarakat, dengan adanya hubungan agen pemberdaya. Konteks sumberdaya yang dikemukakan Kabeer, juga termasuk kendali (*control*), maupun kendala (*constraints*) yang terdapat di rumah tangga maupun masyarakat, misalnya kendali suami, termasuk dalam pemberian izin perempuan untuk terlibat dalam aktivitas di luar rumah, termasuk keterlibatan dalam organisasi perempuan.

Kedua, '*agency*' (*process*) sebagai kemampuan mendefinisikan tujuan dan mencapainya yang dapat berupa kemampuan melakukan negosiasi, tawar menawar dalam sebuah keadaan atau pengambilan keputusan, memanipulasi atau memainkan, yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama; Kabeer mendefinisikan *agency* sebagai sebuah proses bagaimana pilihan-pilihan dibuat serta menimbulkan dampak. *Agency* menurut Kabeer sering dioperasionalisasikan sebagai pengambilan keputusan, namun membahas mengenai *agency* juga berhubungan dengan *power relations*. *Power relation* terdiri dari *power to* dalam pemberdayaan memiliki arti bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain, selanjutnya *power with* yaitu memiliki arti bahwa dengan pemberdayaan mengandung makna kolektif. Hal ini bisa mengatasi masalah bersama dan *power within*, yaitu adanya daya dari dalam untuk ikut memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam pemberdayaan, *power* dimaknai dengan 2 konotasi, *power* dimaknai positif apabila merujuk pada kemampuan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya dan mengejar tujuan mereka, meskipun menghadapi pertentangan. Sedangkan, dalam makna negatif, dikaitkan dengan *power over* diartikan sebagai kemampuan satu aktor untuk mempengaruhi aktor lain melalui jalan kekerasan, ancaman dan pemaksaan. Selain dimaknai sebagai bagian dari *decision-making* dan *power relations*, motivasi, tujuan serta makna dari bagaimana perempuan melakukan perannya di rumah tangga maupun masyarakat merupakan bagian dari *senseofagency*.

Ketiga, '*achievements*' (*outcomes*, menurut Sen seperti yang dikutip dari Kabeer menyatakan bahwa adanya sumber daya (*resources*) yang kemudian *agency* menjadikan suatu kemampuan serta potensi seseorang untuk hidup sesuai yang mereka inginkan, atau mencapai nilai dari "*being and doing*" dalam tujuan mereka, maka nilai dari pencapaian ini merupakan *outcomes* dari *agency*. Beberapa ahli yang menyepakati pemberdayaan sebagai proses dari pada sebuah tujuan, sepakat bahwa pencapaian dari suatu pemberdayaan merupakan sumberdaya untuk memulai pemberdayaan yang lain. Pencapaian pemberdayaan yang paling awal dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan

praktis gender, atau sering dikaitkan dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dimana erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi, namun dari pada itu pencapaian yang di dapat dengan adanya pemberdayaan adalah melalui partisipasi politik maupun partisipasi perempuan dalam kegiatan di masyarakat, hal ini berkaitan sebagai bentuk kesadaran perempuan akan isu-isu sosial di lingkungan sekitarnya (*conscientization*) atau berkaitan dengan *critical consciousness* perempuan, serta bagaimana perempuan ikut ambil bagian dalam pemecahan masalah.

Senada dengan Kabeer dalam Mayoux menyatakan bahwa terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:

1. *Welfare* (Kesejahteraan)

Aspek ini dapat dikatakan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Kesejahteraan ini dibagi ke dalam tiga unsur utama berikut:

- b. Partisipasi ekonomi perempuan merupakan hal yang penting tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan, melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan.
- c. Pencapaian pendidikan merupakan aspek paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, perempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik.
- d. Kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebuah konsep yang terkait dengan perbedaan substansial antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi, dan untuk mengemukakan keselamatan fundamental dan integritas seseorang.

2. *Access* (Akses)

Dalam bahasa Longwe, akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak/akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerjadan semua pelayanan publik yang setara dengan perempuan. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan tempat ia tinggal. Tanpa akses, pemahaman, serta kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin jauh lebih termarginalisasi dari komunitasnya, negaranya, dan bahkan dunia.

3. *Consientisation* (Konsientisasi)

Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender.

4. *Participation* (Partisipasi)

Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada

keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam penformulasian kebijakan mempengaruhi masyarakat mereka.

5. *Equality of Control* (Kesetaraan dalam kekuasaan)

Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan.

Di Indonesia keberadaan perempuan yang jumlahnya hampir seimbang dengan laki-laki membuat pendekatan pemberdayaan dianggap suatu strategi yang melihat perempuan bukan sebagai beban pembangunan melainkan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunggang proses pembangunan. Pembangunan yang menyeluruh menuntut adanya peran serta laki-laki dan perempuan di segala bidang. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan. Dengan demikian, perempuan sama halnya dengan laki-laki dapat menjadi sumber daya fisik lainnya sebagai penentu tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur dan sejahtera.

Feminisme dalam Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminisme Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan sebagai sub ordinat laki-laki. Dengan demikian, feminisme Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional-konservatif di satu pihak dan pro feminisme modern dipihak lain.

Feminisme Islam inilah yang oleh Mahzar disebut dengan Pasca Feminisme Islam Integratif, yang menempatkan perempuan sebagai kawan laki-laki untuk membebaskan manusia dari tarikan naluri kehewan dan tarikan keserbamesinan di masa depan.⁵⁰ Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan apa yang disebut Riffat Hassan "*Islam pasca-patriarkhi*", yang tidak lain adalah dalam bahasa Riffat sendiri "*Islam Qur'ani*" yang sangat memperhatikan pembebasan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau yang lain-lain yang menghalangi manusia mengaktualisasikan visi Qur'ani, tentang tujuan hidup manusia yang mawujud dalam pernyataan klasik: kepada Allah lah mereka kembali. Tujuan Islam Qur'ani adalah untuk menegakkan perdamaian yang merupakan makna dasar Islam.

Tanpa penghapusan ketidaksetaraan, ketidaksejajaran dan ketidakadilan, yang meliputi kehidupan manusia, pribadi maupun kolektif, tidak mungkin untuk berbicara tentang perdamaian dalam pengertian yang diingatkan Al-Qur'an.⁵¹ Gerakan feminisme Islam (*harakah tahrir al-mar'ah*) dalam sejarah Islam sendiri, khususnya di Indonesia,

⁵⁰ Armahedi Mahzar, *Islam Masa Depan*, (Pustaka, 1993), hlm. 49

⁵¹ Riffat Hassan, *Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi* dalam Fatima Memissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm. 99-100.

berlangsung dalam beberapa cara.⁵²

Pertama, melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan, yang dilakukan melalui pembentukan pusat studi wanita di perguruan-perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan dan *training-training* gender, melalui seminar-seminar maupun konsultasi-konsultasi. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki konsen dengan persoalan-persoalan keperempuanan, seperti P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Rifka An-Nisa WCC (*Woman Crisis Centre*), Yasanti (Yayasan Annisa Swasti) dan lain-lain. Selain itu, lembaga-lembaga dalam konsen ini juga dikenal dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan Negara yang dinilai merugikan keberadaan perempuan.

Kedua, melalui buku-buku yang ditulis dalam beragam tema, ada yang melalui fiqh pemberdayaan sebagaimana dilakukan Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*,⁵³ yang ditulis dengan gaya dialog, melalui sastra, baik novel cerpen sebagaimana tampak dari karya-karya Nawal el-Sadawi seperti, *Perempuan di Titik Nol*,⁵⁴ *Memoar seorang Dokter Perempuan*⁵⁵ dan lain-lain atau Tsitsi dengan novelnya *Warisan*⁵⁶ dan sebagainya.

Ketiga, melakukan kajian historis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sejarah masyarakat Islam, yang berhasil menempatkan perempuan yang benar-benar sejajar dengan laki-laki dan membuat mereka mencapai tingkat prestasi yang istimewa dalam berbagai bidang, baik politik, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Karya-karya Fatima Mernissi yang berjudul *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, karya Ruth Roded yang berjudul *Kembang Peradaban*, karya Hibbah Rauf Izzat yang berjudul *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*, merupakan sebagian contoh dari gerakan feminisme jenis ini.

Keempat, melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan, baik Al-Qur'an maupun hadits, yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dilakukan penafsiran ulang dengan pendekatan *hermeneutic* dan melibatkan pisau analisis yang ada dalam ilmu-ilmu sosial untuk menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Ini dilakukan sebagai alternatif terhadap penafsiran klasik yang cenderung mempertahankan makna literal teks-teks yang tampak patriarkis tersebut. Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Riffat Hassan dan Asghar Ali Engineer sangat intens dalam melakukan gerakan feminisme jenis ini.

Dalam bukunya yang diberi judul *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, Pendidikan*,⁵⁷ Jalaluddin Rakhmat menulis sebuah uraian tentang feminisme, ringkas dan sangat menarik. Setelah meninjau berbagai gerakan dan visi feminisme, Jalaluddin Rakhmat berkesimpulan: "Walhasil, Islam sangat memuliakan perempuan. Orang Islam

⁵²Ahmad Baidowi, *Gerakan Feminisme dalam Islam*, (Jurnal Penelitian, Vol. X No 2, Mei-Agustus 2001), hlm. 211-213.

⁵³Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997)

⁵⁴Nawal el-Sadawi, *Perempuan di Titik Nol*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991)

⁵⁵Nawal el-Sadawi, *Memoar Seorang Dokter Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991)

⁵⁶Tsitsi, *Warisan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994)

⁵⁷Jalaluddin Rakhmat, *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 42.

harus berjuang memuliakan mereka. Bila keadaan perempuan sekarang ini belum mulia, maka kaum muslim wajib mengubah masyarakat sehingga posisi mereka menjadi mulia. Jadi sampai disini orang Islam boleh dikatakan feminis.”

David Jary dan Julia Jary menyebutkan salah satu pengertian feminisme dengan teori atau praktek sosio politik yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi kaum laki-laki.⁵⁸ Merujuk pada pengertian “feminisme” yang dikemukakan David Jary dan Julia Jary tersebut, pernyataan Jalaluddin Rakhmat bahwa Islam mendukung feminisme, bukanlah sesuatu yang berlebihan, karena Islam memang menentang ketidakadilan terhadap siapapun, termasuk ketidakadilan terhadap perempuan. Alih-alih, Islam justru mengajarkan agar umat Islam memperjuangkan kemuliaan dan martabat perempuan yang sebelum kedatangan Islam tidak dihargai.

Muthahhari mencatat bahwa menurut Islam, perempuan dan laki-laki adalah sama-sama manusia dan keduanya mendapatkan hak-hak yang sama, tidak berbeda, atau dalam kata lain bisa disebut sebagai makhluk yang sebanding. Perempuan dan laki-laki tidak identik antara yang satu dengan yang lainnya dalam banyak aspek. Bagi Muthahhari, dunia tidak persis sama bagi perempuan dan laki-laki. Apa yang dihadapi perempuan dan laki-laki di dunia tidaklah sama, maka yang diperlukan tentu saja kesetaraan, bukan keseragaman.⁵⁹

Yvonne Yazbeck Haddad yang menegaskan bahwa Al-Qur’an merupakan sumber nilai yang pertama kali menggagas konsep keadilan gender dalam sejarah panjang umat manusia. Diantara kebudayaan dan peradaban dunia yang hidup pada masa turunannya Al-Qur’an, seperti Yahudi, Romawi, Cina, India, Persia, Kristen, dan Arab pra Islam, tidak satu pun yang menempatkan perempuan lebih bermartabat dan lebih terhormat daripada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh Al-Qur’an.⁶⁰

Dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Ayat-ayat tentang prinsip kesetaraan gender itu bisa dirangkum ke dalam beberapa variabel. *Pertama*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, seperti tercantum dalam surat adz-Dzariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Selanjutnya pada surat al-Hujurat ayat 13 berikut:

يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِيَّاكُمْ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
تَتَّقُنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

⁵⁸David Jary dan Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, (Glasgow: Harper Collins Publisher, 1991), h. 223-224.

⁵⁹Murtadha, Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, (Rausyanfikir Institute : Yogyakarta, 2012), hlm. 78

⁶⁰Yvonne Y Haddad, *Contemporary Islam and the Challenge of History*, (New York: State University of New York, 1980), hlm. 56.

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Demikian juga pada surat an-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah dimuka bumi, seperti tercantum dalam surat al-An'am ayat 165 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

165. dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan, seperti tercantum dalam surat al-A'raf ayat 172, berikut:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

172. dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

Keempat, Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis seperti

terlihat dalam surat al-Baqarah ayat 35 sebagai berikut:

وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾

35. dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.

Selanjutnya pada surat al-Baqarah ayat 187 berikut:

اٰجِلًا لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْعَنَ بَشِيْرُوْهُمْ وَاَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاَكْلُوا وَاَشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْاَحْيَاطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْاَحْيَاطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ اٰمُوا الصِّيَامَ اِلَى الْاَيْلِ ۗ وَلَا تَبَشِّرُوْهُمْ ۗ وَاَنْتُمْ عَنِكُمْ فِى الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرُبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Demikian juga pada surat al-A'raf ayat 20 berikut:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِۤاٰتِيْهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنِ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلٰٓئِكَةً اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

20. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".

Dan surat al-A'raf ayat 22-23 sebagai berikut:

فَدَلَّيْنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ بُيُوتِهِمَا وَطَفِقَا مَخَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
وَنَادَيْنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ نَنْهَكَمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

22. Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

23. keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi.

Kelima, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi seperti tercantum dalam surat Ali Imran ayat 195 sebagai berikut:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ
هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Selanjutnya pada surat an-Nisa' ayat 124, sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

124. Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Selain ayat-ayat yang menekankan keadilan gender tersebut, praktek kehidupan sosial pada masa nabi diakui telah menempatkan posisi perempuan dalam kedudukan yang setara dengan laki-laki. Struktur patriarki pada masa jahiliyah dibongkar Islam, dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang pada masa sebelumnya tidak diberikan. Nabipun menyuruh umat Islam untuk mengadakan aqiqah untuk menyambut kelahiran anak perempuan, sebagaimana halnya anak laki-laki.

Jika pada masa jahiliyah, perempuan tidak diberi hak untuk mewarisi, bahkan menjadi harta yang diwariskan, Islam memberikan warisan kepada mereka sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Berbeda dengan perlakuan masyarakat Arab Jahiliyah kepada perempuan, Islam menempatkannya dalam posisi yang sangat terhormat. Sehingga, pada masa Nabi ini tercipta relasi laki-laki dan perempuan yang ideal, dimana mereka benar-benar setara. Roded⁶¹ mencatat, bahwa perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan itu telah memunculkan mereka mencapai prestasi sebagaimana yang diperoleh laki-laki. Menurutnya, dari ribuan sahabat Nabi, 1200 diantaranya adalah perempuan, mereka berhubungan langsung dengan Nabi. Ibnu Sa'ad menulis tentang 600 an perempuan-perempuan sahabat Nabi yang ikut menyemarakkan kota Madinah.⁶² Fatima Mernissi juga mencatat adanya banyak perempuan yang berhasil menguasai tahta kekuasaan politik.⁶³

Sedangkan pemberdayaan perempuan menurut persepektif Islam adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik di ranah domestik maupun publik. Kesalahan aktivitas perempuan diarahkan. Kesuksesan seorang perempuan di sektor domestik (rumah tangga) di tandai dengan berperannya perempuan dalam mengatur rumah tangga sesuai dengan aturan yang telah Allah turunkan. Perempuan yang mendidik anak-anaknya dan mengatur

⁶¹Ruth Roded, *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi Muslim*, Penj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1995)

⁶²Ibnu Sa'ad, *The Woman of Madina*, Penerj. Aisha Bewley, (London: Taha Publishing Ltd, 1995)

⁶³Fatima Mernissi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, Penerj. Rahmani Astuti, Enna Hadi, (Bandung: Mizan, 1994)

urusan rumah tangganya.⁶⁴

Dalam hal ini Mahmud Syaltut menulis: “Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir (dapat didapatkan) sama, Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki potensi dan kemampuan yang cukup agar masing-masing dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus”. Sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 34 berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat ini menegaskan bahwa berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak perempuan dalam berbagai segi, termasuk dalam hak kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.⁶⁵

Islam membenarkan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan, perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri ataupun bersama orang lain, dengan lembaga keuangan maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya, selama mereka membutuhkan pekerjaan dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan oleh perempuan di masa Nabi cukup

⁶⁴Siti Muslikati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gemalnsani Press, 2004), hlm. 131

⁶⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 428

beraneka ragam, misalnya Ummu Salim Binti Malham bekerja sebagai perias pengantin pada masa Nabi. Istri Nabi Khadijah binti Khuwailid dalam bidang perdagangan, dan masih banyak lagi contoh menyangkut perempuan yang bekerja dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Selain mengurus suami dan anak sesuai dengan kadar intelektual dan profesinya maka mereka berkewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat.⁶⁶ Agar hal tersebut dapat berjalan beriringan, maka perempuan dapat menentukan manakah dari sekian banyak kemaslahatan yang lebih penting dan harus dipecahkan pertama kali, misalnya dengan skala prioritas. Skala prioritas sebagaimana dijelaskan pada sosiologi menunjukkan bahwa penunaian tugas oleh perempuan atas tanggung jawab mengurus suami dan membahagiakan serta mendidik anak-anak agar menjadi anak soleh merupakan tingkat kemaslahatan yang paling tinggi atau merupakan tuntutan skala prioritas primer dalam konsep kemaslahatan masyarakat.

Dihadapkan dari realita ini jika dalam suatu kondisi perempuan dihadapkan kepada tugas dan kewajiban dan rumah tangga serta aktivitas keilmuan dan sosial lainnya, padahal dia tidak sanggup menunaikan keduanya dalam waktu bersamaan, maka yang harus dikerjakan berdasarkan retorika skala prioritas adalah menunaikan tugas dan kewajiban rumah tangga maka hal itu harus mengorbankan kepentingan lainnya.

Hal ini lebih jelas lagi ketika perempuan bekerja hanya untuk mengejar status sosial atau hanya demi kebanggaan terhadap masyarakat. Dalam kondisi semacam ini, perempuan harus mendahulukan kehidupan, seperti merawat dan mendidik anak-anaknya.

Islam merupakan agama yang universal, tidak hanya mengatur masalah ekonomi, sosial budaya, perdagangan dan lainnya, tetapi juga mengatur masalah manusia dunia dan akhirat, Islam tidak melarang penganutnya untuk bekerja, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam Islam dengan bekerja merupakan sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Apalagi jika bekerja dengan seorang mukmin tidak hanya dapat menghindarkan dirinya dari meminta-minta, tetapi juga dapat menafkahi orang tuanya yang sudah renta dan anak-anaknya yang pada masih kecil. Beberapa anjuran mengenai bekerja terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 15 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Allah SWT memberikan berbagai macam kekayaan alam dan muka bumi, hingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan makan, minum dan lain-lainnya. Segala bahan yang Allah telah sediakan di muka bumi ini dengan mudah dapat diraih asalkan mau bekerja dengan keras. Jadi orang mukmin tidak boleh berpangku tangan menghadapi kehidupan.⁶⁷ Ayat diatas dengan tegas memerintahkan kepada manusia

⁶⁶Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, (Karangasem: Era Intermedia, 2002), hlm. 70

⁶⁷Muhammad Thalib, *Membangun Ekonomi Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hlm. 234-235

untuk bekerja keras agar mereka dapat hidup makmur. Perintah mengelola bumi untuk kemakmuran menunjukkan bahwa manusia wajib bekerja keras agar mendapatkan rezeki dari Allah SWT.

Pada dasarnya ajaran Islam sangat mendorong kepada kaum perempuan untuk bekerja keras bekerja secara optimal dan maksimal sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Karena itulah, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan pria dan perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk menyatakan pendapat dan aspirasinya. Bahkan sebagian dari mereka ada yang ikut berperang, mendukung tugas pria. Perempuan yang bekerja di luar rumah harus bisa menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, perempuan yang bekerja tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab pokok dan paling utama bagi perempuan muslimah.

5. Pengembangan Masyarakat Islam

Menurut definisi Ibnu Khaldun, secara etimologi pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas. Masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam, yang meneliti hubungan dan keterkaitan ideologis yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemikiran sosiologis, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan namun secara kodrati manusia memiliki kekurangan. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun.⁶⁸

Amrullah Ahmad, Nani Machendrawati, dan Agus Ahmad mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Menstransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*usrah*), kelompok sosial (*jama'ah*) dan masyarakat (*ummah*). Model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal sholeh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Pengembangan Masyarakat Islam menurut Ibnu Khaldun yang menyatakan konsep dan tujuan pengembangan masyarakat Islam yaitu individu, *ashabiyah*, masyarakat *ijtima' al-insani*, negara dan peradaban. Uraian tujuan pengembangan masyarakat Islam dimaksud sebagai berikut:

1) Individu.

Dalam pemikiran sosiologis, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan, namun secara kudroti manusia memiliki kekurangan dan kelemahan di samping kelebihan yang dimiliki. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun.

2) *Ashabiyah*.

Ashabiyah atau kekeluargaan merupakan sebuah kekuatan atas pertalian darah. Sikap kekeluargaan ini jika dibina dan diarahkan kepada penanaman jiwa

⁶⁸Muhtadi dan Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), hlm. 6

keagamaan maka akan menghasilkan sikap yang positif mengarah kepada sikap religius untuk menjalankan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

3) Masyarakat *Ijtima' al-Insani*.

Sikap ini merupakan sikap saling membutuhkan, tolong menolong dan solidaritas maka terciptalah sistem sosial masyarakat yang tergabung dalam *al-ijtima' al insani*. Berkaitan dengan pengembangan masyarakat Islam maka masyarakat di sini diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang Islami.

4) Negara.

Negara dalam konteks ini merupakan suatu wadah dan alat, baik melalui pemimpin atau alat lainnya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan ajaran Islam.

5) Peradaban.

Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat Islam adalah terwujudnya masyarakat madani (*civil society*), dengan nilai-nilai peradaban yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokratisasi, inklusivisme, independen, makmur dan sejahtera.⁶⁹

Empat strategi atau aktivitas utama dakwah Islam yang dilakukan adalah *bil Lisan* (dengan lisan), *bil Qalam* (dengan tulisan), *bil Qudwah* (dengan teladan) dan *bil Hal* (dengan aksi atau tindakan nyata)⁷⁰, salah satu bentuk dakwah *bil Hal* adalah pemberdayaan masyarakat yang merupakan dakwah dalam bentuk aksi nyata. Upaya pemberdayaan masyarakat ditandai dengan menjadikan manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Islam menyebutkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dimuka bumi untuk membangun dan mengelola dunia sesuai dengan kehendak Allah. Islam merupakan agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sebagai agama gerakan atau perubahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

⁶⁹Muhtadi dan Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), hlm. 8

⁷⁰Asep Syamsul M. Romli, *Komunikasi Dakwah, Pendekatan Praktis*, (www.romeltea.com, 2013), hlm. 11

Sering dikatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah wujud dari dakwah bil Hal. Tokoh Amrullah Ahmad, Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Secara terminologis, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua sesuai ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*usrah*), kelompok sosial (*jamaah*) dan masyarakat (*ummah*).⁷¹

Pengembangan kemampuan seseorang dimulai dengan menciptakan suasana yang kondusif. Suasana yang kondusif akan menciptakan kondisi yang nyaman dan hati yang tenteram, keadaan ini akan merangsang pemikiran yang cemerlang. Suasana yang kondusif harus diciptakan agar masyarakat mampu mengembangkan ide dan kreativitasnya sehingga bisa menghasilkan produk yang bernilai. Pemberdayaan masyarakat mempunyai kesamaan dengan dakwah dalam bentuk aksi. Kemajuan akan diperoleh seseorang jika mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Hal ini sama seperti perintah Nabi yang memerintahkan semua orang untuk bekerja keras, beribadah taat, bersikap baik terhadap semua orang, menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat agar mampu melakukan perubahan perilaku ke arah kemandirian (berdaya). Pengembangan masyarakat memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya.⁷² Semua komponen yang ada harus bersinergi untuk membantu masyarakat untuk keluar dari ketidakberdayaan. Untuk itu kerjasama dengan prinsip tolong menolong harus dikedepankan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْاَهْدَىٰ وَلَا الْاَلْقَلَيْدَ وَلَا ءَايِنَ الْاَبْيَتِ
 الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَحْرِمُوْكُمْ شَيْئًا مِّنْ
 صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
 وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu

⁷¹Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 42

⁷²Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Alfabeta, Bandung, 2019), hlm. 75

orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Konsep pemberdayaan sering dikaitkan dengan dakwah, dakwah dan pemberdayaan memiliki keterikatan yang cukup signifikan bahkan secara terperinci dapat dikatakan bahwa dakwah adalah proses pemberdayaan masyarakat. Makna dakwah sebagai proses pemberdayaan tidak terlepas dari tiga dimensi dakwah, yaitu makro, mezzo dan mikro.⁷³ Pemberdayaan pada tingkatan makro yaitu berupa hidayah, muatannya murni berupa Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pemberdayaan pada tingkatan mezzo integral sebagai hasil penelaahan dari kandungan Al-Qur'an dan as-Sunnah berupa metodologi yaitu konsep, teori dan kebijakan. Adapun pemberdayaan pada tingkatan mikro adalah aktualisasi berupa tindakan, kegiatan dan sebagainya yang berupa kerja nyata. Jadi, ketiga tingkatan makna dakwah yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat merupakan kesatuan yang saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Ketiganya saling melengkapi sehingga menciptakan satu tujuan yang padu untuk meraih keberhasilan.

Intinya dakwah dan pemberdayaan masyarakat sama-sama bertujuan untuk upaya perbaikan pada mutu hidup baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya.⁷⁴ Menyelesaikan masalah yang ada termasuk masalah kesehatan masyarakat dengan berbagai pendekatan yang memungkinkan memperoleh solusi yang tepat. Memotivasi, mengingatkan, merangkul, mendampingi, bersahabat dengan masyarakat, inilah dasar dari dakwah dan pemberdayaan. Perubahan kearah yang lebih baik adalah tujuan utamanya. Beragam cara dan media yang digunakan menjadi strategi dalam pencapaian tujuan keduanya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai secara bertahap menurut Fauzie Nurdin⁷⁵, yaitu tahap pertama jika diarahkan agar mampu meningkatkan kesadaran kritis maka masyarakat diharapkan mampu membuat argumentasi dari berbagai macam eksploitasi sekaligus keputusan atas pilihan hidup dan masalah yang dihadapi. Pada tahap berikutnya masyarakat dapat menganalisis sendiri masalah mereka, mengidentifikasi penyebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru. Selanjutnya dapat mengoptimalkan potensi

⁷³Yasril Yazid dan Nur Alhidayatillah, *Dakwah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 106

⁷⁴Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Alfabeta, Bandung, 2019), hlm. 109

⁷⁵Fauzie Nurdin, *Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Pengelolaan Resolusi Konflik*, (Panta Rhei Books, Jogjakarta, 2016), hlm. 29-30

sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya lokal untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan dengan apa yang diteladankan Rasulullah SAW ketika membangun dan mengembangkan masyarakat, setidaknya harus ditempuh tiga tahapan atau fase pengembangan masyarakat Islam, yakni *takwin*, *tanzim* dan *taudi'*.⁷⁶ *Takwin* adalah tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan utama tahap ini adalah dakwah *bil lisan* sebagai ikhtiar sosialisasi *akidah*, *ukhuwah*, dan *la'awun*. Semua aspek tadi ditata menjadi instrumen sosiologis. Proses sosialisasi dimulai dari unit-unit terkecil dan terdekat sampai pada perwujudan-perwujudan kesepakatan. Sasaran tahap pertama ini adalah terjadinya internalisasi Islam dalam kepribadian masyarakat, kemudian mengekspresikannya dalam *ghirah* (semangat) dan sikap membela keimanan dari tekanan struktural (para penindas). Implementasi tahap *takwin* dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah sosialisasi dan penyampaian informasi dengan berbagai metode dan media komunikasi (dakwah), secara konvensional, media cetak, media luar ruang, media elektronik maupun media sosial. Diharapkan terjadi pembentukan masyarakat dengan internalisasi perilaku hidup bersih dan sehat sampai adanya komitmen dan kesepakatan.

Dalam kerangka *community development*, Baiat Aqabah adalah semacam MoU (*Memorandum of Understanding*) yang akan ditindaklanjuti dengan *Memorandum of Agreement* (kesepakatan bersama untuk melaksanakan program bersama) *Baitul Aqabah* adalah kristalisasi interaksi *da'i* dakwah (pendakwah) dan *mad'u* (yang didakwah) yang paling fundamental yang melahirkan struktur hubungan sosial Islam. Kesepakatan (*bai'at*) antara *da'i* (pendakwah) dan *mad'u* (yang didakwahi) merupakan sunatullah dalam sejarah yang menentukan keberhasilan dakwah Islam. Karena *bai'at* merupakan prinsip pengorganisasian Islam, maka adanya organisasi dakwah merupakan sunatullah untuk keberhasilan dakwah.

Tahap berikutnya adalah *tanzim*, yakni tahap pembinaan dan penataan masyarakat.⁷⁷ Pada fase ini internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk institusional Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Dalam perspektif strategi dakwah, hijrah dilakukan ketika tekanan kultural, struktural dan militer sudah demikian mencekam sehingga jika tidak hijrah, bisa terjadi involusi kelembagaan dan menjadi lumpuh. Nabi memulai gerakan penataan dakwah (*tandhim*) dengan hijrah. Hijrah, yang dapat diberi pengertian pemutusan keterikatan masyarakat dengan tanahnya, bisa mengubah pandangan manusia terhadap alam dan mengubahnya menjadi pandangan yang luas dan menyeluruh yang dapat menghilangkan kejumudan, kemerosotan sosial, pemikiran dan perasaan, sehingga masyarakat yang jumud menjadi dinamis. Dalam proses hijrah, masyarakat diajak memutus hubungan dari lingkungan dan tata nilai yang zalim sebagai upaya pembebasan manusia untuk menemukan jati diri yang fitri yang terendam dilingkungan sosiokultur yang tidak Islami.

⁷⁶Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Islam; Transformasi Sosial Berbasis Tauhid*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 149-152

⁷⁷Ajahari, *Pengembangan Masyarakat Islam; Anatomi, Proses, Tahapan dan Wilayah Pengembangannya*, (Jakarta, 2001)

Bila kedua tahap tadi sudah selesai dijalankan, masuklah pada tahap ketiga, yaitu *taudi'*, yang dimaksud dengan *taudi'* adalah tahap keterlepasan dan kemandirian.⁷⁸ Pada tahap ini, umat telah siap menjadi masyarakat mandiri terutama secara manajerial. Bila ketiga tahap ini selamat dilalui, bolehlah berharap akan munculnya suatu masyarakat Islam yang memiliki kualitas yang siap dipertandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain dalam arena pasar bebas. Pada fase masyarakat mandiri atau disebut orang dengan masyarakat madani, pembebasan manusia dan dunia dari kemiskinan, konflik etnis, dan keagamaan dan juga penindasan atas nama Negara, ideologi politik bahkan agama. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa upaya dakwah bukan semata-mata proses mengenal manusia kepada Tuhannya, melainkan juga sebuah proses transformasi sosial.

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam*, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak.⁷⁹

Pertama, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif "Barat" yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual *an sich*.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi.

6. Pengembangan Masyarakat ke Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan masyarakat diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat (*empowering society*). Kegiatan pengembangan masyarakat

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Nanih Mahendrawati, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam; Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001) hlm. 42.

pada awalnya difokuskan pada pencapaian target perubahan kuantitatif yang diindikasikan dengan tersedianya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan materiil. Realisasi target perubahan kuantitatif sebagai modal awal menuju proses perubahan kualitatif yang ditandai dengan terberdayakannya masyarakat baik dalam cara berpikir, bersikap maupun mengambil keputusan. Jika masyarakat sudah mampu mandiri dalam berpikir, bersikap dan mengambil tindakan serta sudah mampu berorientasi jangka panjang, makro dan substansi berarti masyarakat sudah berada dalam tahapan terberdayakan.

Konsep pemberdayaan masyarakat berangkat dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya *power* dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tak berdaya. Dalam sejarahnya, pemberdayaan menjadi sebuah gerakan perlawanan pembangunan alternatif terhadap *hegemoni developmentalisme* (teori modernisasi). Sejak tiga dekade silam, para ahli pembangunan berhaluan kritis telah melontarkan pertanyaan besar, mengapa terjadi kemiskinan di tengah-tengah gencarnya proyek-proyek pembangunan? Dudley Seers (1969), misalnya, menilai pertanyaan kritis itu telah mengundang upaya serius dalam memikirkan kembali doktrin-doktrin pembangunan. Muncul penilaian bahwa merajalelanya kemiskinan di Dunia Ketiga disebabkan karena gagalnya model pembangunan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh teori modernisasi atau doktrin *developmentalisme*. Bisa dikatakan, model pembangunan pro pertumbuhan yang meyakini terjadinya “efek tetesan ke bawah” (*trickle down effect*) ternyata tidak mampu mengangkat kesejahteraan penduduk miskin. Sebaliknya yang terjadi justru penyedotan ke atas (*trickle up effect*) atau malahan akan terjadi penyedotan produksi (*production squeeze*). Hal ini terjadi karena program-program pembangunan direncanakan secara terpusat (*top down*), yang sering kali tidak sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat bawah yang menjadi tujuan pembangunan. Selain itu, para perencana dan penentu kebijakan yang menggariskan sasaran pembangunan dan mengalokasikan sumber dana sering berada di bawah tekanan situasi untuk memproduksi hasil kuantitatif dalam waktu singkat sehingga cenderung menekankan sasaran-sasaran dari atas.⁸⁰ Keadaan ini sangat wajar jika program pembangunan pro pertumbuhan tidak berdampak besar dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat lapis bawah. Akibatnya, segmen masyarakat yang miskin tetap dalam kondisi miskin, bahkan ada yang bertambah miskin, sedangkan kelompok masyarakat yang kaya bertambah kaya.

Keterbatasan yang melekat pada pola pembangunan pro pertumbuhan menjadi pelajaran ironis dalam sejarah manusia. Pada tahun 1990, pemberdayaan diyakini sebagai sebuah “pembangunan alternatif” atas model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan. Pemberdayaan merupakan pola pembangunan yang berpusat pada rakyat dan ditujukan untuk membangun kemandirian masyarakat. Pemberdayaan didalamnya mengandung nilai-nilai intrinsik dan nilai-nilai instrumental. Pemberdayaan memiliki relevansi pada tataran individual dan kelembagaan serta bisa berkaitan dengan masalah

⁸⁰Sutoro Eko, et., al., *Desa Membangun Indonesia*, Cetakan Pertama FPPD 2014, Yogyakarta, hlm. 4

perekonomian, sosial maupun politik. Terdapat beberapa kemungkinan definisi tentang pemberdayaan, termasuk definisi pemberdayaan yang berbasis pada hak-hak asasi.

Kebanyakan definisi pemberdayaan menekankan pada isu-isu mendapatkan kemampuan dan mengontrol terhadap keputusan dan sumber daya yang menentukan kualitas hidup seseorang. Kerangka kerja pemberdayaan dan persamaan kaum perempuan UNICEF menekankan akses kaum perempuan, kesadaran terhadap sebab-sebab kesenjangan, kemampuan mengarahkan minatnya sendiri dan mengambil kendali dan tindakan mengatasi kendala dalam mengatasi kesenjangan struktural. Definisi pemberdayaan pada level yang berbeda-beda baik: pribadi, yang mencakup rasa percaya diri dan kemampuan seseorang; relational, yang menekankan kemampuan bernegosiasi dan mempengaruhi hubungan dan keputusan; serta pada level kolektif. Kabeer memfokuskan definisi pemberdayaan pada tiga dimensi yang menentukan dalam menggunakan strategi pilihan dalam kehidupan seseorang yaitu: akses terhadap sumber daya, agen dan hasil. Amartya Sen mendefinisikan pemberdayaan dengan menekankan pentingnya kebebasan hakiki dan kebebasan individual dalam memilih dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda.⁸¹ Menurut Jim Ife, *empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community* (pemberdayaan artinya memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.⁸² Sementara itu, World Bank mengartikan *empowerment is expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control and hold accountable institutions that affect their live* (pemberdayaan adalah perluasan aset-aset dan kemampuan-kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan, mempengaruhi, mengontrol dan mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya”.⁸³

Berdasarkan penelitian kepustakaan, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan.⁸⁴ Pertama, proses pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Kecenderungan pemberdayaan jenis ini disebut kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua, kecenderungan pemberdayaan yang dipengaruhi karya Paulo Freire (1972) yang memperkenalkan istilah konsientisasi (*conscientization*). Konsientisasi merupakan suatu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi

⁸¹Deepa Narayan and Patti Petesch, *Voice of the Poor; From Many Lands*, A Copublication of Oxford University Press and the World Bank, Washington DC, 2002, pp. 10

⁸²Jim Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*, Longman, Australia, 1995, pp. 182

⁸³Deepa Narayan and Patti Petesch, *Voice of the Poor; From Many Lands*, A Copublication of Oxford University Press and the World Bank, Washington DC, 2002, pp. 11

⁸⁴Onny S. Prijono, *Pemberdayaan; Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1996

dan sosial. Seseorang sudah berada dalam tahap konsientisasi jika sanggup menganalisis masalah mereka, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri.

Dalam kerangka ini, pemberdayaan diidentikkan dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya. Kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara melihat ke dalam diri sendiri serta menggunakan apa yang didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Meminjam definisi *Asian Development Bank* (ADB), kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik: (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) secara holistik; dan (5) berkelanjutan (Latama, 2002)⁸⁵. Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal jika perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal *return to local resource* dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat lokal. Dengan demikian maka prinsip daya saing komparatif akan dilaksanakan sebagai dasar atau langkah awal untuk mencapai daya saing kompetitif. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis lokal tidak membuat penduduk lokal sekedar penonton dan pemerhati di luar sistem, tetapi melibatkan mereka dalam pembangunan itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan jika dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bukannya meningkatkan produksi. Ini merubah prinsip-prinsip yang dianut selama ini yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih diarahkan pemenuhan target-target variabel ekonomi makro. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan ini antara lain berupa pembentukan bentuk usaha kemitraan yang mutualistis antara orang lokal (orang miskin) dengan orang yang lebih mampu. Kemitraan akan membuka akses orang miskin terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas. Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik berarti mencakup semua aspek, untuk itu setiap sumber daya lokal patut diketahui dan didayagunakan. Hal ini untuk menghindarkan masyarakat dari sikap ketergantungan kepada segala sesuatu.

Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan jika programnya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi maupun segi sosial. Keberlanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam kaitannya ini maka perlu ada kelembagaan ekonomi yang menyediakan, menampung dan memberikan akses bagi setiap pelaku. Keberlanjutan sosial berarti bahwa pembangunan tidak melawan, merusak dan atau menggantikan sistem dan nilai sosial yang positif yang telah teruji sekian lama dan telah dipraktekkan oleh masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Upaya pemberdayaan, seperti dikatakan

⁸⁵Zubaedi, Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 59

Kartasasmita (1996)⁸⁶ harus dilakukan melalui tiga arah. *Pertama*, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya, setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Artinya, langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya. *Ketiga*, melindungi masyarakat (*protection*). Hal ini berarti dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan dan pelayanan). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat.

Pemberdayaan akan bisa berjalan sesuai harapan jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Menurut hasil kajian Ross yang dikutip oleh Tampubolon (2001)⁸⁷, setidaknya ada tiga pendekatan pemberdayaan yang bisa dipilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan: Upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang digagas LSM pada umumnya memusatkan perhatian kepada nasib orang-orang kecil. Orang kecil adalah kelompok masyarakat yang dianggap kurang beruntung (*disadvantage groups*) karena berada dalam situasi serba kekurangan serta dibalut oleh berbagai kondisi yang menekan kehidupan. Kondisi-kondisi yang menekan kehidupannya antara lain berupa: lemahnya nilai tukar hasil produksi, lemahnya organisasi, rendahnya perkembangan sumberdaya manusia, rendahnya produktivitas, lemahnya akses dari hasil pembangunan, minimnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan, sederhananya teknologi yang dimiliki, adanya kesenjangan antara kaya dan miskin, minimnya kemampuan berpartisipasi dalam sistem pembangunan nasional, lemahnya posisi tawar menawar. Kalau kondisi-kondisi tersebut dikaitkan satu sama lain dalam pola hubungan sebab akibat, maka muncullah wajah orang kecil yang serba kurang mampu berbentuk segitiga yang terdiri dari rendahnya pendapatan, adanya kesenjangan sosial yang semakin melebar dan rendahnya kemampuan berpartisipasi dalam sistem nasional. Kalau ditelusuri sebab-sebabnya maka yang menjadi sebab paling pokok adalah lemahnya pengembangan

⁸⁶Ginjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996, hlm. 159-160

⁸⁷Mangatas Tampubolon, Pendidikan, Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan*; Nomor 32, November 2001, hlm. 17

sumber daya manusia. Dengan kata lain, fokus kegiatan pengembangan masyarakat adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Kita akui, kemiskinan saat ini menjadi agenda persoalan yang mendesak untuk dipecahkan. Kemiskinan merupakan fakta yang setiap kali terucap selalu menyisakan sebuah kegetiran. Getir karena selalu ingin dipecahkan tapi kunjung tuntas. Dalam buku *Development as Freedom and Poverty and Famines*, Amartya Sen memberikan pengertian kemiskinan sebagai ketiadaan akses berupa informasi, kesehatan, pendidikan dan tentu saja sandang, pangan dan papan (Saidiman, 2005).⁸⁸ Menurut definisi yang lebih umum, kemiskinan merupakan masalah pembangunan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan biasanya dibagi dalam dua model: *pertama*, kemiskinan kronis (*chronic poverty*) atau disebut juga kemiskinan struktural, karena terjadi secara terus-menerus. *Kedua*, kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara. Kemiskinan seperti ini biasanya menimpa masyarakat karena terjadi sebuah gejala sosial, konflik horizontal, perang atau bencana alam. Jika dicermati, kemiskinan memiliki sejumlah indikator, untuk kasus Indonesia para akademisi menggunakan standar garis kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk kebutuhan makanan dan non makanan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kehidupan yang layak. Penentuan standar minimum diperlukan untuk membedakan antara penduduk miskin dan yang tidak miskin. Standar minimum BPS 1999 menyebutkan bahwa apabila penduduk dalam pengeluaran tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara dengan 2.100 kalori perhari, ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum non makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, pendidikan dasar, transportasi, dan aneka barang lainnya, maka disebut miskin. Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin menjelaskan konsep tentang fakir miskin adalah individu yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak baik kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Timbulnya krisis ekonomi sejak tahun 1997 sampai sekarang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Faktor peningkatan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh meningkatnya indeks pengeluaran makanan dan non makanan. Penggunaan standar kemiskinan oleh BPS ini sebagai akibat dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar. Artinya, indikator kemiskinan juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas nilai rupiah. Indikator umum kemiskinan dapat dibagi dalam setidaknya 9 titik penting: *Pertama*, penghasilan rendah, yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per-orang perbulan berdasarkan data BPS. *Kedua*, ketergantungan pada bantuan pangan miskin (zakat, raskin, santunan sosial, atau kompensasi BBM). *Ketiga*, keterbatasan kepemilikan pakaian bagi setiap anggota keluarga per-tahun (misalnya hanya mampu memiliki pakaian satu pasang setiap orang

⁸⁸Zubaedi, Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 77

per-tahun). *Keempat*, tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit. *Kelima*, tidak mampu membiayai pendidikan 9 tahun. *Keenam*, tidak memiliki harta yang mampu dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas kemiskinan. *Ketujuh*, ada anggota yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari 40 tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sejak awal. *Kedelapan*, ada anggota keluarga usia 15 tahun ke atas yang buta aksara. Dan *kesembilan*, tinggal di rumah yang tidak layak huni, atau bahkan tidak punya tempat tinggal. Kategori tempat tinggal yang tidak layak dapat diukur berdasarkan beberapa kategori berikut: *pertama*, luas bangunan sempit atau hanya mendukung fungsi ruang yang terbatas (memiliki bagian ruangan yang tidak membedakan fungsi untuk ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dan dapur) atau luas lantai per-orang untuk keperluan sehari-hari kurang dari 4 m². *Kedua*, lantai masih dari tanah, bambu, atau dipleset secara sederhana. *Ketiga*, kesulitan memperoleh air bersih. *Keempat*, tidak memiliki tempat mandi, cuci pakaian, atau membuang air besar (MCK) yang memenuhi standar kesehatan. *Kelima*, tidak memiliki sarana sirkulasi udara yang baik yang memungkinkan matahari untuk masuk. *Keenam*, dinding umumnya terbuat dari bambu, papan, atau bahan yang mudah lapuk. Dan *ketujuh*, sanitasi lingkungan yang tidak sehat (Saidiman, 2005).⁸⁹ Kondisi sosial yang terlampau memprihatinkan, yang ditandai dengan kemunculan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan dan pengangguran menjadi tantangan tersendiri bagi aktivis pengembangan masyarakat. Hal ini diperberat dengan semakin terbatasnya peran negara dalam membantu kaum marginal. Kenyataannya, hanya orang yang mempunyai hak-hak istimewa saja yang bisa memperoleh dukungan untuk meraup keuntungan atas kesempatan bersaing dalam perekonomian dan pembelian jasa atau layanan kesejahteraan yang mahal. Sementara, individu dan keluarga yang tidak beruntung mustahil mendapatkannya. Untuk itu, seiring dengan bertambahnya tingkat pengangguran dan langkanya pekerjaan, naiknya ongkos perumahan dan makanan, tekanan keluarga dan penyusutan fasilitas dan layanan yang dijamin negara, semua itu tidaklah mengejutkan jika bertambah pula tingkat penderitaan dan tekanan hidup yang menimpa kelompok-kelompok yang termarginalkan (Robert, 2005).⁹⁰ Secara politis, sulit kiranya mengatasi kondisi-kondisi yang menimpa sebagian masyarakat yang termarginalkan. *Human Development Report* yang dikeluarkan UNDP tahun 2005 membuktikan liberalisasi ekonomi kian memperluas ketidakadilan dalam hal distribusi pendapatan dan kesempatan hidup antara Negara kaya dan negara miskin. Total pendapatan 500 warga terkaya di dunia jauh lebih besar daripada total pendapatan 416 juta warga termiskin di dunia. Yang lebih ekstrem lagi 2,5 milyar (40%) penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari USD 2 sehari, hanya menguasai 5% dari pendapatan global. Sementara 10% orang terkaya di dunia menguasai 54% pendapatan global. Dengan kondisi struktural semacam itu, tidak mengherankan kalau sekarang dihadapkan pada meluasnya pemiskinan dan tingginya angka kemiskinan global. Berdasarkan catatan Indeks Pembangunan Manusia atau

⁸⁹Zubaedi, Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 79

⁹⁰Zubaedi, Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 79

Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan UNDP diketahui bahwa ketidakadilan global kian mengancam kesempatan hidup kaum miskin. Sebagai gambaran, pada tahun 2003, 18 negara dengan total penduduk 460 milyar mencapai HDI yang jauh lebih rendah dari pada HDI yang dapat dicapainya di tahun 1990. Ada dua kalimat yang dapat menggambarkan dunia dewasa ini, globalisasi (pasar bebas) pada hakekatnya adalah *sosialisme bagi si kaya, kapitalisme bagi si miskin*. Negara kaya dan korporasi internasional justru menginternalisasi sosialisme; dengan menjaga solidaritas dan distribusi merata keuntungan yang mereka peroleh dari negara-negara miskin. Sebaliknya negara miskin justru dipaksa mengusung kapitalisme; dalam bentuk liberalisasi, deregulasi dan privatisasi. Dunia dewasa ini sama halnya dengan kolonialisme dahulu, hanya dalam bentuk yang baru. Gambaran sederhana tersebut menjelaskan adanya paradoks besar dalam paradigma kemiskinan. Pasca krisis Keynesian tahun 1980-an, transformasi paradigma kapitalistik mengalami lompatan ekstrim ke arah neoliberalisme. Kesadaran Keynes akan adanya *sesuatu yang salah* dengan kapitalisme justru hilang tanpa bekas hanya karena kegagalan Negara dalam mengelola perekonomian. Neoliberalisme semakin tidak memberikan tempat bagi negara, bahkan untuk melakukan kebijakan demi keadilan sosial. Subsidi, jaminan pelayanan publik dasar, dan jaminan sosial lainnya dianggap inefisiensi. Pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar manusia justru menjadi komoditas yang diperdagangkan (Sulhin, 2006).⁹¹ Neoliberalisme memaksa negara miskin ikut dalam pasar bebas. Bukan sebagai *stakeholder* yang kompetitif, namun hanya sebagai pemberi ruang investasi asing dengan menghilangkan segala macam bentuk hambatan. Di lain pihak, negara-negara kaya justru semakin “sosialis” dengan memperkuat solidaritas dalam *World Trade Organization, World Bank, dan International Monetary Fund*. Sumber daya dunia terdistribusi relatif merata di antara segelintir negara kaya dan korporasi internasional. Ditengah liberalisasi ekonomi yang menjanjikan kemakmuran global, sedikitnya 1,2 milyar penduduk di negara berkembang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem (penghasilan kurang dari USD 1 sehari). Padahal subsidi untuk seekor sapi di Eropa saja besarnya 2 USD sehari. Setiap jam ditemukan 1.200 anak mati. Menurut laporan HDI tahun 2005, angka kematian tersebut setara dengan tiga kali tsunami dalam sebulan. Setiap tahun sedikitnya 529.000 perempuan mati di saat hamil dan melahirkan anak. Setiap tahun 10,7 juta anak mati tanpa sempat merayakan ulang tahun yang kelima. Hal serupa terjadi di Indonesia. USAID mencatat, di Indonesia setiap jam terdapat 24 balita meninggal. Dari jumlah tersebut, 54% meninggal karena gizi buruk, 19% karena diare dan gangguan pernafasan. Sementara ibu meninggal saat melahirkan mencapai 5 juta per tahun atau 2 kematian ibu hamil melahirkan setiap jam. Tentang kemiskinan, kajian Econit menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin (*absolute poor*) pada kuartal I tahun 2006 membengkak menjadi 51,2 juta jiwa dari 41 juta jiwa pada akhir 2005. Sedangkan angka kemiskinan pada periode yang sama meningkat menjadi 23% dari 18,6%. Sementara Bank Dunia menyebutkan lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin karena masih hidup dengan penghasilan di bawah

⁹¹Zubacdi, *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 80

2 USD atau Rp. 18.310 per hari. Jumlah penduduk miskin itu setara dengan gabungan dari jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Dengan kata lain, sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara berada di Indonesia. Dilihat dari pendekatan sosial, fenomena kemiskinan merupakan salah satu bentuk masalah sosial. Kemiskinan muncul sebagai akibat adanya kesalahan dalam proses kehidupan sosial. Pemecahan masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, tetapi perlu didahului dengan langkah diagnosis masalah untuk mengungkap sumber kesalahan atau akar penyebab kemiskinan. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan dalam mendiagnosis masalah kemiskinan. *Pertama, individual blame approach*, diagnosis masalah kemiskinan dilakukan dengan mencari sumber masalah kemiskinan dari dalam pribadi si penyandang masalah. Melalui pendekatan ini, pada umumnya diidentifikasi sumber masalahnya adalah kurangnya pengetahuan dan pendidikan, penguasaan *skill* yang rendah, tingkat kesehatan dan kelemahan fisik, etos kerja yang rendah dan faktor-faktor lain yang berasal dari pribadi penyandang masalah.

Kedua, system blame approach, sumber masalah kemiskinan yang dicari berada pada level sistem seperti struktur sosial yang menghasilkan alokasi dan penguasaan sumber daya yang timpang, institusi sosial yang melahirkan berbagai diskriminasi, kurangnya akses dalam pengambilan keputusan untuk lapisan masyarakat tertentu dan sejenisnya. Bisa ditegaskan, kemiskinan adalah masalah kemanusiaan. Para aktivis pengembangan masyarakat perlu mengambil langkah-langkah nyata dalam mengatasi masalah kemiskinan ini. Peran strategis untuk menangani masalah-masalah sosial khususnya kemiskinan melalui gerakan peningkatan kekuatan dan perluasan akses pada komunitas lokal dan organisasi rakyat dalam mengontrol sumber daya. Menurut sejumlah literatur, keberadaan aksi-aksi pembangunan alternative antara lain melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menyempurnakan keterbatasan dan kekurangan dari model pembangunan pro pertumbuhan. Secara empiris, model pembangunan pro pertumbuhan cenderung bercorak simplistik. Salah satu indikasinya adalah penekannya pada upaya-upaya akumulasi modal fisik (*physical capital*) secara sentralistik dan cenderung mengabaikan aspek keterkaitannya dengan kapital-kapital yang lain seperti modal alami (*natural capital*), modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*). Ketidakseimbangan antar kapital telah melahirkan multikrisis dalam pembangunan selama ini.⁹²

Untuk mengatasi krisis tersebut membutuhkan upaya sinergis kolaboratif dari berbagai pihak dalam mengembangkan berbagai sumber daya (modal) yang dimiliki. Melalui upaya pengembangan kapital sosial (*social capital*) menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan disamping ketiga kapital lainnya. Pendekatan model alternatif pembangunan melalui strategi reaktualisasi pembangunan sosial, dilakukan untuk mereduksi berbagai ketimpangan yang terjadi khususnya ketimpangan personal yang terjadi di masyarakat melalui reaktualisasi modal sosial

⁹²Grace A.J Rumagit, *Alternatif Model Pembangunan Ekonomi Indonesia Menghadapi Era Globalisasi (Suatu Kajian Empiris)*, PPs IPB, Bogor, 2002, hlm. 6

secara sinergis dan simultan dengan modal fisik, modal manusia dan modal alamiah. Serangkaian aksi pengembangan masyarakat menunjukkan kesadaran dari elemen *civil society* dalam berbagai peran membangun kualitas hidup masyarakat kurang mampu.

Strategi reaktualisasi pembangunan sosial dilakukan melalui dua model kegiatan intervensi yaitu:

- 1) Model *Social Action*, model ini menekankan pada gerakan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara partisipatif (*collective action*). Aktifitas pengembangan masyarakat dikenal sebagai gerakan moral yang lebih mengutamakan pengembangan kualitas modal sosial seperti: kepatuhan pada sistem norma (*norms*), tata nilai (*values*), sikap (*attitudes*), keyakinan (*beliefs*), budaya bernegara (*civic culture*), saling percaya (*social-trust*), solidaritas dalam bekerjasama (*solidarity cooperation*), perilaku dalam bekerjasama (*cooperative behavior*), peran dan aturan main (*roles and rules*), jaringan kerja (*networks*), hubungan interpersonal (*interpersonal relationship*), tata cara dan keteladanan (*procedures and precedents*), organisasi sosial (*social organization*), keterkaitan horizontal dan vertikal (*horizontal and vertical linkages*). Secara kuantitatif, proporsi modal sosial yang diintervensi relatif lebih banyak (kurang lebih 75 persen) dibandingkan ketiga modal yang lain (manusia, alamiah dan fisik). Pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat merupakan upaya strategis dalam mempercepat peningkatan modal sosial masyarakat. Dalam pendekatan partisipatif ini setiap warga dari kelompok sasaran program selalu dikutsertakan dalam merencanakan, melaksanakan, menikmati dan melestarikan program. Harapannya, pelibatan warga secara aktif dalam pengorganisasian dan pelaksanaan program bisa mewujudkan dua hasil. Di satu sisi akan menciptakan program berjalan secara efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat serta di sisi lain akan mentradisikan semangat berdemokrasi di kalangan mereka.⁹³
- 2) Model *Sustainable*, aktivitas pengembangan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kesinambungan (*sustainable*). Kesinambungan di sini dimaksudkan sebagai upaya-upaya pengembangan kehidupan masyarakat yang menekankan pada intervensi modal sosial, modal manusia, modal fisik dan modal alamiah (*environment*) secara sinergis dan berimbang. Bisa dikatakan, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan alternatif umumnya diupayakan oleh para aktivis bersama warga dalam rangka memupuk modal sosial yang sebenarnya telah dimiliki masyarakat. Modal sosial (*social capital*) perlu dipupuk mengingat menjadi salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Investasi dalam modal sosial dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan kesehatan menghasilkan sumber pertumbuhan yang tidak kalah pentingnya dengan investasi pada modal fisik. Menurut sejumlah studi, peranan modal sosial tidak kalah pentingnya dengan infrastruktur ekonomi

⁹³Paulo Vieira da Cunha, Maria Valeria Junho Pena, *The limits and merits of participation*, World Bank, Office of the Senior Vice President and Chief Economist, Development Economics, Washington, D.C., 1997, pp. 1

lainnya sehingga upaya untuk membangun modal sosial perlu diprioritaskan. Pembentukan modal sosial dapat menyumbang pada pembangunan ekonomi karena adanya jaringan (*networks*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) didalamnya yang menjadi kolaborasi (koordinasi dan kooperasi) sosial untuk kepentingan bersama. Aspek kepercayaan atau *trust* merupakan unsur yang sangat esensial sekali didalam membentuk modal sosial, oleh karena merupakan intinya dari modal sosial (*core of capital social*). Negara kita sudah merasakan hal itu, bagaimana lunturnya rasa kepercayaan antar komponen bangsa telah menyebabkan krisis multidimensional sampai saat ini. Jika pembangunan ekonomi diinginkan tetap berlanjut maka hubungan, sikap dan pranata sosial dalam masyarakat harus diperbaiki. Pembangunan ekonomi harus bisa mengimbangi perubahan sosial yang terjadi, sehingga ketegangan sosial bisa dihindari. Upaya untuk memaksakan derap pembangunan yang terlalu cepat mungkin secara ekonomi akan sia-sia, karena perubahan kehidupan sosial belum terwujud, padahal perubahan tersebut diperlukan guna memungkinkan masyarakat mengadakan pembangunan yang diperlukan, sehingga masyarakat memperoleh dan menunjang pembangunan ekonomi tersebut. Orientasi ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan pada sisi lain telah menumbuhkan mental pertumbuhan (*growth mentality*) yang membuat orang mengakumulasi materi sebanyak-banyaknya, dengan tidak memperdulikan orang lain yang sangat membutuhkan materi tersebut tetapi tidak bisa memperolehnya. Pola pikir (*mind-set*) orang berubah untuk mengejar dan mengakumulasi materi sebanyak-banyaknya, karena keyakinan bahwa materi yang banyak akan memberikan kepuasan hidup. Kondisi demikian ini akan membuat orang semakin berorientasi pada dirinya sendiri dan kurang memikirkan kesejahteraan orang lain, yang pada akhirnya akan menumbuhkan masalah sosial, serta kesenjangan ekonomi antara golongan atas dan golongan bawah semakin melebar.

Hanya masyarakat yang memiliki modal sosial yang dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi. Revitalisasi dan pengembangan modal sosial perlu dilakukan agar masyarakat mampu menggerakkan roda perekonomian. Modal sosial kalau dikelola dengan baik dan benar justru akan lebih mampu memberdayakan masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan kelembagaan (pranata) sosial ekonomi mutlak diperlukan dan mendesak guna mendukung pemenuhan modal sosial dalam pembangunan. Faktor kelembagaan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sepanjang hal itu memungkinkan adanya pembagian kerja yang lebih jauh, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan kebebasan untuk memperoleh peluang ekonomi. Dalam kehidupan nyata, kelembagaan itu dapat menjadi peubah eksogen dalam proses pembangunan, dengan demikian kelembagaan dianggap sebagai penyebab segala perubahan pembangunan. Namun dipihak lain, kelembagaan bisa juga menjadi peubah endogen, dimana perubahan kelembagaan diakibatkan karena adanya perubahan-perubahan pada sistem sosial masyarakat yang ada. Karena itu akhirnya kelembagaan yang ada dalam masyarakat sudah mengalami berbagai zaman. Sehingga banyak lembaga-lembaga yang sudah hilang, tetapi banyak juga lembaga-lembaga baru yang bermunculan sesuai dengan iklim pembangunan.

Pembentukan kelembagaan dalam masyarakat tidak terlepas dari peranan individu, kelompok atau pemerintah. Sehingga lembaga-lembaga yang hidup dalam masyarakat ada yang bersifat orisinil (kelembagaan informal) yang bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun, dan ada pula yang tercipta baik dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri (kelembagaan formal). Kelembagaan formal maupun informal tersebut sangat berperan sekali dalam pembangunan. Kedua lembaga ini selalu mempengaruhi berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan sering dijadikan sebagai *option* dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu apabila partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, maka penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat adalah merupakan suatu syarat pokok. Munculnya konsep modal sosial dalam pembangunan ekonomi adalah merupakan respon dari para ahli terhadap semakin berkurangnya hubungan sosial dalam masyarakat. Kerenggangan dalam kehidupan sosial pada akhirnya akan menyebabkan semakin tingginya ketimpangan sosial yang sangat mengganggu jalannya pembangunan. Oleh karena itu dalam upaya membangun sebuah bangsa yang kompetitif peranan modal sosial menjadi sangat penting. Jaringan sosial (*social networks*) dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi karena di dalamnya mengandung *trust* yang merupakan elemen terpenting dalam jaringan.⁹⁴ Pentingnya unsur *trust* ini dalam jaringan sosial, bahwa modal sosial tersebut terhadap *trust* sebagai faktor kunci mediasi untuk memperkecil *transaction cost* dalam *communities* dan *enterprises* yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara lebih efektif. Modal sosial mengasumsikan pentingnya hubungan (*relationship*) dalam urusan-urusan ekonomi. Perusahaan, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga industri baik pada tingkat regional nasional dapat berfungsi secara lebih efisien jika satu sama lain saling menghargai (*mutually respectful*) dan memiliki hubungan kepercayaan (*trusting relationship*). Dalam kerangka ini, dapat dikatakan bahwa pemupukan modal sosial dapat menyumbang pada pembangunan ekonomi karena di dalamnya terdapat jaringan, norma, dan kepercayaan. Modal sosial, seperti diakui oleh World Bank (2003), sangat relevan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini karena modal sosial merupakan resep untuk menaikkan prospek ekonomi masyarakat dan bangsa, termasuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan secara berkompenten dan akuntabilitas institusi politik. Di samping itu, modal sosial dapat memfasilitasi munculnya pasar bebas dalam perekonomian global. Adanya peningkatan pendidikan misalnya, telah menyebabkan masyarakat di negara maju lebih berkembang. Kemajuan pendidikan membawa mereka ke arah penalaran (*reasoning*) yang bisa menghasilkan berbagai inovasi baru dan akhirnya memunculkan kelas ekonomi baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial ekonomi. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, berani mengambil risiko untuk mendapat keuntungan. Mereka juga mengembangkan hidup hemat dalam

⁹⁴Dasgupta dan Stiglitz, *Social Capital: A Multifaceted Perspective*, The World Bank, Washington D.C., 2000

rangka memaksimalkan *output* berdasarkan *input* tertentu. Putnam (1993),⁹⁵ telah menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi secara positif dengan kehadiran modal sosial. Pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan berjalan baik apabila ciri-ciri berikut ini dimiliki oleh masyarakat: (1) hadirnya hubungan yang erat antar anggota masyarakat, (2) adanya para pemimpin yang jujur dan egaliter yang memperlakukan dirinya sebagai bagian dari masyarakat bukan sebagai penguasa, dan (3) adanya rasa saling percaya dan kerjasama di antara unsur masyarakat. Putnam dalam penelitiannya membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan di wilayah utara Italia berkorelasi dengan kehadiran ciri-ciri tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di wilayah Asia Timur disebabkan oleh adanya kegiatan ekonomi yang bertumpu pada pemupukan modal sosial. Kemajuan negara Cina dalam bidang ekonomi digambarkan oleh Putnam sebagai akibat dari penerapan konsep ekonomi yang berdasarkan jaringan sosial, khususnya jaringan sosial bisnis antar sesama masyarakat dalam negeri dan masyarakat cina perantauan (*overseas chinese*). Pengembangan ekonomi pedesaan (*village economy*) dalam sebuah sinergi antara satu kegiatan ekonomi di suatu desa dengan desa yang lainnya telah membangkitkan pertumbuhan ekonomi negara Cina. Semua ahli sepakat bahwa untuk membangun modal sosial harus dimulai dari pendidikan pada lembaga keluarga dan sekolah. Namun tidak kalah pentingnya lagi adalah pembangunan modal sosial melalui berbagai pelatihan kelompok untuk membangun visi dan misi bersama serta menumbuhkan saling percaya. Cara yang kedua ini tampaknya lebih efektif didalam membangun modal sosial. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa belajar bersama dalam kelompok (*learning group*) dapat meningkatkan hasil kerja kelompok dan perasaan menyatu dalam organisasi. Kilpatrick (2002)⁹⁶, telah melakukan simulasi bagaimana membangun modal sosial pada keluarga usaha tani di Australia melalui program pelatihan secara reguler. Hasilnya menunjukkan bahwa pelatihan secara kelompok tersebut sangat positif secara ekonomi. Mereka mau dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan. Setiap anggota kelompok mampu mengkombinasikan antara pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang bisa menciptakan usaha tani yang lebih baik lagi. Demikian pula Ancok (2003), yang melakukan observasi terhadap dampak *Leadership Development Program* di PT. Caltex Pacific Indonesia menunjukkan adanya penguatan modal sosial, yang ditandai dengan sesama anggota perusahaan merasa lebih akrab dan melihat orang lain sebagai bagian dari sukses perusahaan. Di samping kegiatan pendidikan, pemupukan modal sosial bisa juga diupayakan melalui penciptaan hubungan kemasyarakatan. Oleh karena itu, para pekerja sosial kebanyakan menggunakan jalur hubungan kemasyarakatan untuk menyukseskan program-programnya. Dalam konteks ini Bourdieu (1970) berpendapat bahwa modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (misalnya paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu, dan lain-lain). Dalam perspektif yang hampir senada, Coleman (1988) mengatakan

⁹⁵Djamaludin Ancok, *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*, PSIKOLOGIKA, Nomor 15 Volume VIII Tahun 2003, hlm. 4-14.

⁹⁶Arief Daryanto, Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat sebagai Modal Sosial Pembangunan, AGRIMEDIA, Volume 9 Nomor 1 – Maret 2004, hlm. 24-31

bahwa modal sosial adalah sumber daya yang lahir dari kumpulan suatu ikatan sosial tertentu. Menurutnya, modal sosial berbeda dengan asset finansial yang dapat diperoleh dari kredit bank ataupun aset sumber daya manusia yang dapat diperoleh dari intelektualitasnya. Modal sosial hanya dapat diperoleh dan diciptakan dari relasi antar manusia. Modal sosial ini yang melahirkan kontrak sosial dan norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Modal sosial ini, merujuk pendapat Peterson *et al* (2002), dapat dibedakan dalam tiga tipe: (1) *direct social capital, created by repeated direct transactions between two transaction partners*, (2) *indirect social capital, created by the reputation of each transaction partner in direct transactions with others*, and (3) *identitybased social capital, created by each transaction partner's association with broader norms, values, or characteristics shared or held because of group memberships not related to the direct transaction*. Selama ini masih banyak pakar ekonomi yang beranggapan bahwa mekanisme pasar sebagai satu-satunya *problem solver* untuk segenap masalah dalam pembangunan ekonomi, dan mengabaikan peranan kelembagaan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dinilai North (1990) keliru, sebab peran kelembagaan, baik itu kelembagaan sosial, ekonomi dan politik, tidak kalah pentingnya dalam pembangunan ekonomi. North mengatakan pula bahwa reformasi secara radikal dalam tatanan perekonomian suatu Negara tidak akan memberikan hasil yang nyata jika dilakukan hanya dengan memperbaiki kebijakan makro ekonomi. Reformasi perekonomian akan berhasil jika didukung oleh seperangkat kelembagaan yang mampu memberi insentif yang tepat kepada setiap pelaku ekonomi. Lebih jauh lagi, Blakely (1994) mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi itu merupakan suatu proses pembentukan kelembagaan (*institution building*). Dengan demikian pembangunan ekonomi memerlukan kelembagaan dan sistem perencanaan yang mampu mengelola proses pembangunan sepanjang waktu. Oleh karena itu, struktur organisasi pembangunan sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat.⁹⁷

Pendekatan kelembagaan dalam pembangunan di Indonesia mendapat perhatian yang serius dalam rangka mendorong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Telah banyak kelembagaan lokal, regional dan nasional terbentuk baik secara formal maupun informal. Terlebih lagi di daerah pedesaan telah muncul berbagai macam bentuk kelembagaan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan aktifitas kehidupan sosial masyarakat seperti karang taruna, forum RT/RW, gotong royong dan lain-lain. Masing-masing kelembagaan masyarakat yang ada mempunyai fungsi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan di pedesaan setidaknya-tidaknya dikelompokkan menjadi empat jenis:

- a. Lembaga kekerabatan (*kindship institution*), yang berfungsi untuk memenuhi keperluan hidup kekerabatan. Jenis lembaga ini antara lain meliputi: lembaga adat, lembaga perkawinan, kelompok kerukunan keluarga dan sebagainya.
- b. Kelembagaan masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian seperti produksi, permodalan dan pemasaran. Jenis lembaga ini yaitu: kelompok tani, kelompok nelayan, KUD, lumbung padi dan lain-lain.

⁹⁷Arief Daryanto, Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat sebagai Modal Sosial Pembangunan, AGRIMEDIA, Volume 9 Nomor 1 – Maret 2004, hlm. 24-31

- c. Lembaga politik (*political institution*) yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan distribusi kekuasaan dan wewenang dalam mengatur urusan-urusan masyarakat. Jenis lembaga ini antara lain: pemerintahan desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa).
- d. Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya seperti lembaga pendidikan (sekolah), lembaga pelayanan kesehatan (Puskesmas), lembaga keamanan desa (Siskamling), lembaga rohaniah atau keagamaan, lembaga kepemudaan dan sebagainya.⁹⁸

7. Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.⁹⁹ Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apa dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.¹⁰⁰

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan mencakup dua pengertian, yaitu¹⁰¹: *Pertama*: Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya. *Kedua*: Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan diakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan diakhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia.

Menurut perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak saudara, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam,¹⁰² terdapat dalam al-Qur'an surat Thahaa ayat 117-119, yang berbunyi:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

⁹⁸Arief Daryanto, Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat sebagai Modal Sosial Pembangunan, AGRIMEDIA, Volume 9 Nomor 1 – Maret 2004, hlm. 24-31

⁹⁹W. J. S Poerwardarmita, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung, Mizan, 2006), Cet. Ke-4, hlm. 126

¹⁰⁰Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta, Multi Pressindo, 2008), hlm. 166

¹⁰¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Op.cit.*, hlm. 2

¹⁰²M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 1996), hlm. 127

117. Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.

118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,

119. dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".

Berdasarkan kandungan ayat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut menjelaskan sandang, pangan, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama untuk mensejahterakan masyarakat. Idealisasi "kesejahteraan hidup" dalam Islam khususnya, dan agama samawi pada umumnya, adalah "kehidupan surgawi" yaitu kehidupan disurga nanti yang selalu digambarkan yaitu: serba kecukupan pangan yang berkalori dan bergizi; kecukupan sandang yang bagus-bagus; tempat tinggal yang indah dan nyaman; lingkungan hidup yang sehat dan segar; hubungan sosial yang aman, tentram, dan damai; dikelilingi pelayan yang terampil dan menggairahkan; dan hubungan yang selalu dekat dengan Allah, Tuhan maha pemurah.¹⁰³

Kunci keberhasilan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan ideal itu harus melalui proses yang panjang yaitu:

- a. Keimanan yang mantap kepada Allah dan Rasulnya, dan rukun iman lainnya. Kewajiban beriman kepada Allah itu bertujuan untuk menjadi pemegang dalam kehidupan dan dapat mengikat perasaan. Dengan demikian manusia tidak akan menyeleweng ataupun keluar dari jalan yang benar dalam perjalanan bersama yang lain.
- b. Ketekunan melakukan amal-amal shaleh baik amalan yang bersifat ritual seperti shalat, zakat, puasa dan lain-lain, dan amalan yang bersifat social seperti, pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah kesejahteraan lainnya, maupun amalan yang bersifat kultural, yang lebih luas seperti pendayagunaan dan pelestarian budaya alam, penanggulangan bencana, penelitian dan sebagainya.
- c. Kemampuan menangkal diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang merusak kehidupan.¹⁰⁴

Gambaran kesejahteraan "kehidupan surgawi" diidentifikasi sebagai kebahagiaan akhirat. Tetapi di samping kesejahteraan kehidupan surgawi tersebut. Islam juga memberikan perintah agar diupayakan terwujudnya kesejahteraan kehidupan duniawi dengan kunci keberhasilan yang tidak berbeda dengan kunci keberhasilan untuk kesejahteraan kehidupan surgawi. Orang yang memperhatikan dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan cermat, akan selalu mengacu pada perwujudan kemaslahatan manusia, pencapaian-pencapaian maupun kesejahteraan ukhrawi.

¹⁰³Moh. Thahah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 161

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 162

Dilihat dari perspektif Islam, komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.¹⁰⁵

Imam Ghazali mendefinisikan aspek dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartit* meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*).¹⁰⁶

1) Prioritas utama:

“*Ad-Dharuriyyat*” ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. *Dharuriyyat* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan *dharuriyyat* diabaikan, maka tidak akan ada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (*fasad*) di dunia dan kerugian yang nyata diakhirat.

2) Prioritas kedua:

“*Al-Hajiyyat*” ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan, dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini pun masih berkaitan dengan lima tujuan syari’at. Syari’ah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syara’ dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati.

3) Prioritas ketiga:

“*Tahsiniyat*” atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan akhirat dari pada kesenangan hidup. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder serta berkaitan dengan lima tujuan syari’at. Syari’ah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Dan yang dimaksud syari’ah adalah untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi dari *dharuriyyah* dan *hajiyyah*.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder (*the need/haji*), maupun tersier (*the commendable/tahsini*), dan pelengkap (*the huxury/ kamili*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari’ah sehingga tercipta

¹⁰⁵M. Umer Chapra, *Op.cit.*, hlm. 8.

¹⁰⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 62

kehidupan masyarakat yang sejahtera.¹⁰⁷ Oleh karena itu, tujuan dari sistem ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari tujuan syari'ah, yang menurut asy-Syatibi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada terlindunginya keimanan (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-agl*), keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*).¹⁰⁸ Imam Ghazali berpendapat bahwa yang jelas masuk dalam kategori *ad-dharuriyat* yang menjadi prioritas garapan Islam yang menjaga kemaslahatan.¹⁰⁹

Para fuqaha sepakat bahwa kesejahteraan manusia penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syari'ah. Pandangan ini dalam ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, penghapusan semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.¹¹⁰ Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu Beckerman membedakan indikator masyarakat dalam tiga kelompok yaitu: *Pertama*: Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert dan Kravis.; *Kedua*: Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga disetiap negara; *Ketiga*: Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah keadaan bermotor dan konsumsi.¹¹¹

Menurut perspektif Islam, Yusuf Qardawi¹¹² mengemukakan tentang standar kecukupan dan kemandirian keluarga muslim, yaitu: cukup makan yang memenuhi nilai standar gizi; cukup air untuk memasak makanan, pengairan, membersihkan badan, bersuci dan sebagainya; cukup sandang yaitu tersedianya pakaian untuk menutupi aurat menjaga diri dari terik matahari dan udara dingin, serta agar bisa tampil lebih banyak, termasuk perlu memiliki pakaian yang bagus untuk menghadiri peristiwa tertentu, serta pakaian untuk sholat jum'at dan sholat hari raya; cukup papan, yaitu tersedianya tempat tinggal yang layak huni, luas dan lapang terhindar dari kondisi alam, serta merdeka yaitu penghuni rumah tidak terlihat oleh orang lewat; cukup uang untuk keperluan hidup berumah tangga; cukup uang untuk menuntut ilmu dan segala perlengkapannya; cukup uang untuk pengobatan apabila sakit; dan tabungan haji dan umrah.

Kemudian menurut Imam Nawawi sebagaimana dikutip oleh Cahyadi Takariawan mengatakan bahwa: dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, Islam

¹⁰⁷Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.cit.*, hlm. 89

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 66

¹⁰⁹Adiwarman A. Karim, *Op.cit.*, hlm. 164

¹¹⁰M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Alih Bahasa Ikhwani Abidin Basri, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 2

¹¹¹Rudy Badrudin, *Op.cit.*, hlm. 149

¹¹²Richard G. Lipsey dkk, *Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Bina Aksara, 2006), hlm. 103.

menghendaki agar setiap rumah tangga muslim mampu mencapai kondisi standar kecukupan ekonomi dalam berumah tangganya yaitu cukup sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan tanpa berlebihan.¹¹³ Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep Yusuf Qardawi dan Imam Nawawi bahwa standar kecukupan dan kemandirian keluarga muslim ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan untuk pendidikan, dan dilarang untuk berlebih-lebihan dalam pemenuhan kebutuhan. Namun demikian, menurut hemat penulis, standar kecukupan ekonomi bagi sebuah keluarga adalah kesejahteraan keluarga itu sendiri. Hal ini disebabkan karena sebuah keluarga terlihat cukup secara ekonomi apabila keluarga tersebut telah hidup sejahtera. Dikatakan sejahtera apabila seluruh hidup baik jasmani maupun rohani dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup dari masing-masing keluarga itu sendiri.

Untuk mengukur kesejahteraan keluarga, BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) sejak tahun 1994 memperkenalkan kategorisasi baku yang didasarkan pada kondisi fisik maupun nonfisik dari suatu entitas keluarga. Ada lima kategori keluarga sejahtera (KS) menurut BKKBN, yaitu KS tahap Pra Sejahtera, KS Tahap I, KS tahap II, KS tahap III, dan KS tahap III plus. Pengkategorian tersebut didasarkan pada indikator-indikator yang disusun secara hierarkis. Hierarki kategori kesejahteraan keluarga tersebut merupakan terjemahan dari tahapan pembentukan keluarga sejahtera.¹¹⁴

B. Penelitian Terkait Yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, sudah ada penelitian terkait dengan judul yang penulis kaji. Jadi kedudukan penelitian yang peneliti lakukan merupakan pengembangan dari hasil riset sebelumnya. Untuk menghindari adanya temuan-temuan yang sama, penulis memberikan beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan disertasi penulis. Adapun beberapa karya ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai landasan teoritis dan rujukan untuk mendukung dalam penulisan disertasi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Disertasi Agama dan Gerakan Sosial Ekonomi Muslim Pedesaan (Penelitian terhadap Jemaah Majelis Taklim dan Baitul Mal wat Tanwil di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung) oleh Firman Nugraha, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 1439 H/2018 M. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa agama pada muslim pedesaan tidak secara langsung membentuk perilaku ekonomi dan mendorong terwujudnya tindakan kolektif berupa gerakan sosial ekonomi. Gerakan sosial ekonomi keagamaan terbentuk ketika simbol agama bertemu dengan faktor kesempatan, antara lain: *pertama*, dukungan struktural yaitu menguatnya semangat formalisasi doktrin Islam, bukan hanya dalam konteks ritual melainkan juga dalam upaya ekonomi Islam. Dengan demikian gerakan ini dapat

¹¹³Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam*, Cct. Ke-1, (Solo; Intermedia, 2001), hlm. 103.

¹¹⁴Biro Pelaporan dan Statistik, *Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: BKKBN, 1997), hlm. 29.

dikatakan merupakan bagian dari mata rantai “kebangkitan Islam” melalui implementasi ekonomi Islam. *Kedua*, adanya ketegangan struktural akibat terbentuknya kemiskinan baru sebagai dampak perubahan ekologi. *Ketiga*, formalisasi substansi agama menjadi simbol sekaligus *framing* gerakan. *Keempat*, watak kegotongroyongan di pedesaan dan perilaku kolektif alamiah dalam majelis taklim telah menjadi modal dasar untuk menjadi kelompok terorganisir dalam gerakan ekonomi. *Kelima*, adanya aktor gerakan yang hadir dari fregmentasi kewibawaan desa baru akibat modernisasi pedesaan. *Keenam*, gerakan ini bekerja dengan prinsip-prinsip koperasi, sebagai pola yang telah lama akrab dengan kehidupan masyarakat selain kesempatan regulasi. Artinya, penelitian ini berbeda dengan pendapat Max Weber dan Geerts yang menyatakan perilaku ekonomi lebih diperlihatkan oleh pemeluk agama yang modernis. Jika Weber dan Geertz menekankan pemahaman keagamaan yang modern dalam pembentukan perilaku ekonomi ketika bertemu dengan rasionalitas, maka berdasarkan penelitian ini, muslim pedesaan yang tradisional, dorongan perilaku ekonomi kolektifnya terbentuk ketika bertemu dengan enam faktor kesempatan sebagaimana tersebut di atas. Penelitian ini juga berbeda dengan pandangan Joachim Wach yang menyatakan ada keadaan yang paralel antara dimensi pemikiran, ritual dan kehidupan sosial pemeluk agama. Sederhananya, jika dipandang dengan teori Wach ini, kehidupan muslim pedesaan di Arjasari yang tradisional merupakan cerminan dari pemikiran keagamaan yang tradisional juga. Hasil pemikiran yang tradisional ini relatif akan lebih menerima terhadap pelbagai keadaan, termasuk dalam ekonomi sebagai sebuah takdir. Namun demikian, dalam konteks modernisasi pedesaan yang terus berubah, dimensi pemikiran muslim pedesaan ikut terbentuk dengan perubahan-perubahan tersebut. Dan ini berarti bahwa watak implementasi doktrin itu senantiasa selalu berdialog dengan konteks sosialnya.

2. Disertasi Peran Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekanbaru) oleh Herlina, Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 1441 H/2020 M. Penelitian ini menemukan kuantitas dan kualitas dalam berkarya, mengemban amanah antara pekerjaan dan rumah tangga harus berjalan dengan dengan baik dan harmonis. Wanita memilih berkarier harus seizin suami (jika telah berumah tangga) atau izin orangtua/saudara laki-laki dewasa (jika belum berumah tangga). Wanita yang berkarier harus berpegang teguh pada hukum wajib, sunah, makruh, dan haram. Pengejaran prestasi dalam berkarier harus seimbang dengan tingkat pencapaian keharmonisan keluarga. Wanita karier dengan jenis pekerjaan wiraswasta berpengaruh sangat positif dan signifikan terhadap golongan umur, jenis pendidikan, kuantitas waktu bekerja dan jumlah penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas wirausaha dapat menghasilkan jumlah penghasilan yang lebih banyak dengan lebih dapat mengelola waktu yang baik dan fleksibel. Perlu adanya regulasi berupa Undang-undang untuk mengatur pola wanita dalam memainkan peran sebagai wanita karier yang harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agama, terutama pada Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Perkawinan Bab XII.

3. Jurnal Asketik Vol. 1 No. 2 Desember 2017, yang berjudul Islam dan Praktik Pemberdayaan Perempuan: Studi terhadap Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Pemberdayaan Perempuan oleh Yayasan Sahabat Ibu DI Yogyakarta oleh Ahmad Arif Widiyanto, Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Malang. Menurut hasil penelitiannya bahwa penerapan nilai-nilai Islam oleh YSI mampu mendorong lancarnya proses pemberdayaan perempuan. Nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi inspirasi dan instrumen pemberdayaan, namun juga ditransfer pada komunitas melalui program PINTAR. Ajaran-ajaran Islam seperti fikih dan parenting disampaikan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam mendidik anak. Di sisi lain, praktik-praktik Islami seperti ikrar, akad dan infaq membentuk pemahaman bahwa memberdayakan perempuan adalah kewajiban terhadap Tuhan dan sesama. Hal tersebut dapat memperkuat komitmen para partisipan perempuan untuk mengikuti program-program pemberdayaan. Namun, ada juga beberapa partisipan yang memandang praktik tersebut terlalu memberatkan karena kesibukan. Pelajaran yang didapat dari penelitian ini adalah pentingnya revitalisasi nilai-nilai religius dan kearifan lokal dalam program-program pemberdayaan agar dapat lebih kontekstual dan diterima masyarakat.
4. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 19, No.2, Oktober 2014: 154-167, Model Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, oleh Agung Utama, Titin Hera Widi Handayani Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan miskin di Kecamatan Wedi memiliki potensi yang tinggi dalam menjalani profesi kewirausahaan atau memiliki potensi tinggi sebagai calon *entrepreneur* atau wirausaha. Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan miskin di Kecamatan Wedi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan dengan menggunakan model *Project Based Learning* dinilai efektif dikarenakan sebagian besar peserta sukses ditinjau dari tingkat penguasaan kepribadian (jiwa) kewirausahaan dan keterampilan yang dimiliki selama memperoleh pengalaman belajar bisnis riil dengan model *Project Based Learning*. Agar usaha kewirausahaan yang dirintis oleh peserta pelatihan kewirausahaan semakin sukses dan berkembang di masa yang akan datang, perlu kiranya dilakukan pendampingan secara berkala dan berkelanjutan dengan harapan nilai-nilai jiwa kewirausahaan serta keterampilan berusahanya semakin kuat dalam diri peserta pelatihan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa penguasaan keterampilan berwirausaha yang paling lemah adalah kemampuan membangun jaringan dan masalah pemasaran. Oleh karena itu, disarankan agar tahap awal dilakukan pendampingan oleh pihak- pihak terkait dalam membantu kelangsungan dan keberlanjutan usaha yang telah ada.
5. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9, Nomor 1, Juni 2015, Kemiskinan, Perempuan dan Agama, oleh Taufik, Pascasarjana UIN Yogyakarta. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kemiskinan, perempuan dan agama merupakan problematika kehidupan kontemporer yang selalu menjadi perbincangan di kalangan ilmuwan-ilmuwan

baik psikolog, sosiolog, budayawan, antropolog dan sebagainya. Tiga unsur ini cukup mendominasi dalam menggarungi kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Hubungan dialektis antara ketiganya telah melahirkan hubungan yang memilukan. Kalau kita menghubungkan antara kemiskinan dan agama, maka yang menjadi obyek adalah perempuan. Dan, di antara kemiskinan dan perempuan sangat jelas bahwa korban yang paling menderita adalah perempuan. Sementara pertemuan antara perempuan dan agama selalu menimbulkan kegetiran karena agama memandang perempuan sebagai makhluk setengah laki-laki. Faktor yang ikut menyumbang terjadinya kemiskinan adalah kurang tegaknya keadilan. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan membangun masyarakat yang berbasis keadilan. Dalam konteks ini, agama memiliki peran penting, karena agama, mengandung ajaran tentang keadilan.

6. SEPA: Vol. 9 No. 1 September 2012: 134 – 144, Model Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar, oleh Sri Marwanti, Ismi Dwi Astuti, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menuliskan bahwa perempuan miskin di daerah pedesaan perlu diberdayakan melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif. Model yang diusulkan adalah *pro-poor capacity improvement model* (PCIM). Komponen utama pemberdayaan perempuan miskin adalah: (1) adanya dukungan seluruh stakeholders (baik pemerintah, swasta, LSM maupun Perguruan Tinggi) untuk melakukan program-program penanggulangan kemiskinan yang responsif gender; (2) Adanya *Achievement Motivation Training* untuk menumbuhkan kesadaran (keberdayaan) akan pentingnya mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif; (3) Pemantapan jejaring antar sesama perempuan miskin pelaku usaha serta pengusaha lokal sebagai media *learning by doing*; (4) Pembentukan kelompok-kelompok usaha bersama atas dasar kesamaan jenis usaha; (5) Pengembangan kreativitas melalui *capacity building* agar produk yang dihasilkan menarik bagi pembeli dan sesuai selera pasar dan memperhitungkan potensi pasar; (7) Perluasan Sistem Bapak Angkat dengan melibatkan sebanyak mungkin usahawan lokal sehingga dapat memperkuat modal usaha dan pasar bagi perempuan miskin pelaku usaha. Rekomendasi model yang telah dirumuskan perlu diujicobakan dan diteliti kembali efektivitasnya sehingga dapat dikembangkan model yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perempuan miskin di tingkat akar rumput.
7. Jurnal Sosial dan Humaniora WACANA Vol. 12 No. 2 April 2009, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa (*Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo*), oleh Arsiyah, (Mahasiswa Program Magister IAP, PPSUB/Staf Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur) dan Heru Ribawanto serta Sumartono (Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FIA UB). Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa bentuk/macam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa khususnya pengusaha krupuk ikan di Desa Kedungrejo,

Kecamatan Jabon, meliputi: pemberian bantuan modal, bantuan perorangan, pelatihan, studi banding, bantuan bahan baku/peralatan dan perluasan pasar. Sedangkan saran yang disampaikan oleh penulis adalah perlu dilakukan upaya pembinaan yang lebih intensif untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pengusaha krupuk ikan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik melalui pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun studi banding ke daerah penghasil ikan. Perlu diberikan kemudahan dalam dukungan modal, atau kemudahan dalam prosedur untuk memperoleh kredit usaha. Disamping itu perlu diberikan bantuan dalam bentuk peralatan dan sekaligus pelatihan penggunaannya. Perlu diberikan kemudahan fasilitas bagi pengusaha krupuk ikan untuk memperoleh hak paten, dalam hal ini akan mempermudah pengusaha krupuk ikan untuk mengajukan bantuan modal (kredit) kepada Bank. Perlu dilakukan upaya pembenihan ikan di lokasi Desa Kedungrejo itu sendiri agar dapat melancarkan arus produksi.

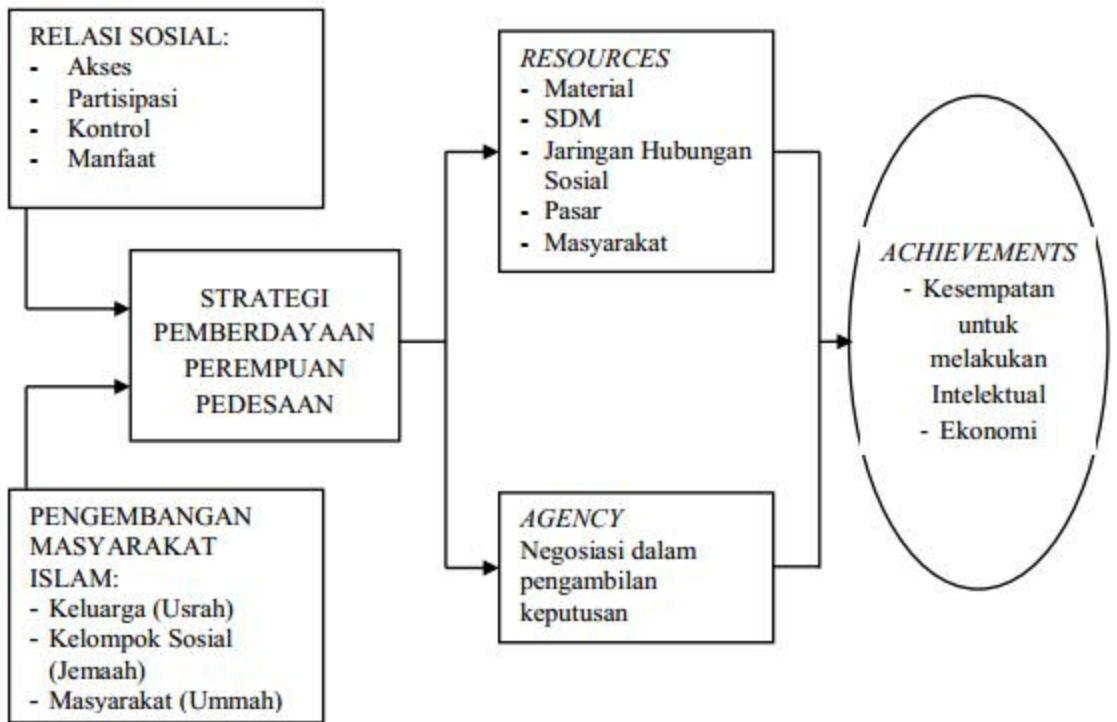
8. Jurnal I-FINANCE Vol. 05 No. 01 Juli 2019, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender dan Ekonomi Islam: Studi Kasus Akses Pengusaha UMK Perempuan terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT di Palembang, oleh Maftukhatusolikhah dan Dwi Budiarto, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Melalui produk-produk pembiayaan yang membuka akses yang luas bagi pengusaha UMK perempuan, khususnya produk pembiayaan tanggung renteng dapat dikatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang sensitif gender dan bisa semakin mendorong terwujudnya gender equalities, karena secara demikian BMT telah menganggap penting potensi, partisipasi, dan akses pengusaha UMK perempuan terhadap sumber-sumber keuangan. Keberadaan BMT dan Produk-produknya yang *accessible* bagi perempuan, secara khusus dapat dikatakan mampu meningkatkan peranan perempuan dalam bidang ekonomi. Dengan membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui berbagai jalur dalam hal ini kewirausahaan, maka diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan memacu pertumbuhan industri (*home industry*), dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup. Di samping itu kaum perempuan nasabah BMT tersebut bisa lebih memaksimalkan *Al-quwwah al-aqliyyah* yang mereka miliki, atau keunggulan potensi intelektual yang antara lain berfungsi melatih keahlian untuk menghasilkan sarana-sarana pendukung kehidupan (peradaban) dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan dan mencapai masalah khususnya dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, program BMT telah mendukung pandangan Islam, karena perempuan juga dapat berkiprah dalam bidang ekonomi, melalui cara bekerjasama dengan elemen masyarakat lainnya dalam membangun peradaban yang luhur. Dalam dalam hal ini perempuan dan laki-laki, dapat bekerjasama memaksimalkan potensi dan peranannya dalam kehidupan, baik dalam peran produktif, peran reproduktif, ataupun peran sosial. Dalam kerangka pencapaian *masalah* yang dimensinya menyeluruh atau *al-maslahah al kuliyyah* dunia dan akhirat yang antara lain terlihat dari implikasinya terhadap terciptanya peradaban yang luhur

sesuai dengan tuntutan Islam, sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan akses yang luas bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, BMT telah membangun konteks, sarana dan prasarana untuk mewujudkan *al-maslahah al kuliyyah* menjadi rasional.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Dari tinjauan pustaka dan landasan teori diatas, yaitu teori Relasi Sosial yang dikemukakan oleh Naila Kabeer serta teori Pengembangan Masyarakat Islam oleh Nanih M, Agus A. Syafei, maka disampaikan kerangka pikir atau alur pikir penelitian ini guna mencapai keberhasilan strategi pemberdayaan perempuan pedesaan dalam perspektif Islam, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Islam; Transformasi Sosial Berbasis Tauhid*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2018
- Agus Ahmad Syafi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001
- Ahmad Baidowi, *Gerakan Feminisme dalam Islam*, Jurnal Penelitian, Volume X Nomor 2, Mei-Agustus 2001
- Ajahari, *Pengembangan Masyarakat Islam; Anatomi, Proses, Tahapan dan Wilayah Pengembangannya*, Jakarta, 2001
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004
- Anityas Dian Susanti, *Pola Partisipasi Warga dalam Pengembangan Desa Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang*, Universitas Diponegoro, ISSN: 0853-2877, Vol. 15 No.1, Januari-Juni 2015
- Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Multi Pressindo, Jakarta, 2008
- Arief Subhan, dkk. *Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Arief Daryanto, *Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat sebagai Modal Sosial Pembangunan*, AGRIMEDIA, Volume 9 Nomor 1 Maret 2004
- Armahedi Mahzar, *Islam Masa Depan*, Pustaka, 1993
- AS, M. (2006, Juni 17). *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*. Diambil kembali dari NU Online: <https://www.nu.or.id/post/read/8016/etika-protestan-dan-spirit-kapitalisme>
- Asep Syamsul M. Romli, *Komunikasi Dakwah, Pendekatan Praktis*, 2013, diakses dari www.romeltea.com
- Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, Semarang: UNNES Press, 2017
- Asyuti, R. (2011, April). *Rekonsepsi Ekonomi Islam dalam Perilaku dan Motivasi Ekonomi*. *Religia*, 14 (1), 75-92.
- Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra Biru, Cetakan I, November 2012
- Barbara Rogers, *The Domestication of Women: Discrimination in Developing Societies*, London and New York: Routledge, 1980
- Basuki, A. & Prasetyo, Y. E., *Memusiumkan Kemiskinan*, Surakarta: PATTIRO Surakarta, 2007
- Biro Pelaporan dan Statistik, *Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Sejahtera*, Jakarta: BKKBN, 1997
- Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam*, Cet. Ke-1, Solo; Intermedia, 2001
- Caroline Mosser, *Gender Planning in the third World: Meeting Practical and Strategic Needs*, dalam Rebecca Grant and Kathleen Newland (eds.), *Gender and International Relations*, Suffolk: Open University Press, 1991

- Chandra Mahardika Putri Dewanti, Supriyanto dan M. Endy Saputro. BANK WAKAF MIKRO USAHA MANDIRI SAKINAH: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. *Journal of Finance and Islamic Banking*. Vol. 3 No. 2 June-December 2020
- Claros, Augusto Lopez dan Saadia Zahidi. 2005. *Woman Empowerment: Measuring The Global Gender Gap*. World Economic Forum. Diakses dari situs: www.weforum.org
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994
- Creswell, J. W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1998
- Darwin, Muhadjir, *Memanusiakan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Benang Merah, 2005
- Dasgupta dan Serageldin, *Social Capital; A Multifaceted Perspective*, The World Bank, Washington D.C., 2000
- David Jary dan Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, Harper Collins Publisher, Glasgow, 1991
- DAWN, "Rethinking Social Development: DAWN's Vision," *World Development* 23, nomor 11, 1996
- Deepa Narayan and Patti Petesch, *Voice of the Poor; From Many Lands*, A Copublication of Oxford University Press and the World Bank, Washington DC, 2002
- Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, Jakarta: LP3ES, 1993
- Djamaludin Ancok, *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*, PSIKOLOGIKA, Nomor 15 Volume VIII Tahun 2003
- Djawahir Hejaziey, *Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran*, (Al-Iqtishad: Vol I No 1, Januari 2009
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: Ptevika Aditam, 2005
- Effendy, Onong Uhejana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Ester Boserup, *Woman's Role in Economic Development*, Great Britain: George Allen and Unwin, 1970
- Faridatuz Zakiyah, Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Miskin pada Koperasi Baytul Ikhtiar (BAIK) Bogor, *RELEVANCE*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2018; hlm. 119-136
- Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Terj. Tim LSPPA Yogyakarta: LSPPA, 1995

- Fatima Mernissi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, Penerjemah Rahmani Astuti, Enna Hadi, Bandung: Mizan, 1994
- Fauzie Nurdin, *Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Pengelolaan Resolusi Konflik*, Panta Rhei Books, Jogjakarta, 2016
- Febriana Fitria Sari dan Moch. Khoirul Anwar. Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Pasar Tradisional Kedurus-Karang Pilang Surabaya), *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2 Nomor 3, Tahun 2019
- Fika Andriana, Agustinar dan Dessy Asnita, Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2021
- Fitria Nur Masithoh, Hari Wahyono, Cipto Wardoyo, Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga dalam Memajukan Kesejahteraan, *National Conference On Economic Education Agustus 2016*, hlm. 530-542
- Ginjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Cidesindo; Jakarta, 1996
- Geeta Chowdhry, *Engendering Development: Women in Development (WID) in International Development Regimes*, dalam Marianne H. Marchand and Jane L. Papart (eds.), *Feminism/Postmodernism/Development*, London and New York: Routledge, 1995
- Grace A.J Rumagit, *Alternatif Model Pembangunan Ekonomi Indonesia Menghadapi Era Globalisasi (Suatu Kajian Empiris)*, PPs IPB, Bogor, 2002
- Hadijah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994
- <http://www.waspada.co.id/kemiskinan-jadi-masalah-terbesar-dunia>
- <https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjek>
- <https://www.bps.go.id>
- Ibnu Sa'ad, *The Woman of Madina*, Penerjemah Aisha Bewley, London: Taha Publishing Ltd, 1995
- Ife, Jim, *Community Development: Creating Community Alternatives: Vision, Analysis, and Practice*, Australia, Longman, 1995
- Irene Tinker (ed.), *Persistent Inequalities: Women and World Development*, New York: Oxford University Press, 1990
- Jalaluddin Rakhmat, *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997
- Joe Fernandez, *Anggaran Pro Kaum Miskin: Konsep dan Praktik*, dalam *Anggaran Pro Kaum Miskin: Sebuah Upaya Menyejahterakan Kaum Miskin*, Jakarta: LP3ES, 2009
- Johny Urbanus Lesnussa, Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Negeri Halong Baguala Ambon, *Jurnal Sosio Sains*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2019, Hlm. 91-107
- Kartasmita Ginjar, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Cidesindo; Jakarta, 1996

- Kathryn Robinson, *Indonesian Women's Rights, International Feminism and Democratic Change*, Communal/Plural 6, nomor 2, 1998
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Kedudukan dan Peran Perempuan; Tafsir al-Qur'an Tematik*. Departemen Agama RI. Jakarta. 2009
- Landung Esarit, Determinan Analisis Gender Pada Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan, *RUANG*, Volume 2 Nomor 3, 2016, hlm. 189-195
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1996
- M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta; Gema Insani Press, 2009
- Maisarah Leli, Strategi Pemasaran dalam Perspektif Islam, *Jurnal At-Tasyri'iy*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019
- Manisha Desai, *Hope in Hard Times: Women's Empowerment and Human Development*, United Nations Development Programme, Human Development Research Paper 2010/14, July 2010
- Mangatas Tampubolon, Pendidikan, Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan*; Nomor 32, November 2001
- Marianne H. Marchand and Jane L. Papart (eds.), *Feminism/Postmodernism/Development*, London and New York: Routledge, 1995
- Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. *Analisis Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta, UI Press, 1992
- Mayoux, Linda, *Gender Equity, Equality, and Women's Empowerment. Principle, Development and Framework*, Aga Khan Foundation, 2001
- McLeod, S. (2019, December 29). *Maslow's Hierarchy of Needs*. Diambil kembali dari Simply Psychology: <https://www.simplypsychology.org/maslow.html>
- Megi Tindangen, Daisy S. M Engka, Patric C. Wauran, Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 20 No. 03 Tahun 2020, hlm. 79-87
- Miftahul Huda, *Motherhood Spirit untuk Kedermawanan Sosial di Muslimat Nahdlatul Ulama Ponorogo*, (Kodifikasi, Vol 9 No 1 Tahun 2015
- Moh. Thahah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta; Lantabora Press, 2005
- Moleong L.J. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintas pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997

- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Karangasem: Era Intermedia, 2002
- Muhammad Thalib, *Membangun Ekonomi Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008
- Muhtadi dan Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013
- Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, Malang: UIN Maliki Press, 2012
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Murtadha, Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Rausyanfikir Institute: Yogyakarta, 2012
- Musafa' Azhar dan Khusnul Khotimah, *Strategi LAZISNU dalam Pemberdayaan Umat (Studi Kasus LAZISNU PAC Dolopo Kabupaten Madiun)*, (JCD: Journal of Community Development and Disaster Management Vol 1 No 2, Juli 2019
- Muttalib, Jang A. 1993. Menggunakan Kerangka Pemampuan Wanita, dalam Moeljarto Tjokrowinoto, dkk. Bahan Pelatihan Jender dan Pembangunan. Kantor Menteri Negara UPW
- Naila Kabeer, *Resource, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*, Development and Change, Vol. 30, 1999
- Nanih Machendrawaty & Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam; dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Nawal el-Sadawi, *Memoar Seorang Dokter Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991
- Nawal el-Sadawi, *Perempuan di Titik Nol*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991
- Nur Arofah, *Role Of Muslimat Nu In Tuwel Village On Women Empowerment (Case Study: Muslimat Nahdlatul Ulama Tuwel Village Tegal Regency)*, 2014, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/20041/18918>
- Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993
- Paulo Vieira da Cunha, Maria Valeria Junho Pena, *The limits and merits of participation*, World Bank, Office of the Senior Vice President and Chief Economist, Development Economics, Washington, D.C., 1997
- Prijono, O.S., Pranarka, A.M.W, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS. Jakarta, 1996
- Qomar, M. N. (2019). Pandangan Al-Quran Tentang Perempuan Bekerja (Hikmah Dibalik Surat Al-Qhashas). *Jurnal Harkat*, 15 (1).
- Rahel Widiawati Kimbal. The practice of womens social capital as the pillars of the family economic in rural area. *International Journal of Communication and Society* Vol. 3, No. 2, December 2021
- Rahma Pramudya Nawang Sari & Anton, *Wanita Karier Perspektif Islam*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 4, Nomor 1, Maret 2020
- Rebecca Grant and Kathleen Newland (eds.), *Gender and International Relations* Suffolk: Open University Press, 1991

- Richard G. Lipsey dkk, *Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Bina Aksara, 2006
- Riffat Hassan, *Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi* dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim LSPPA Yogyakarta: LSPPA, 1995
- Ruth Roded, *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi Muslim*, Penerjemah Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1995
- Sejarah Singkat Muslimat NU, sumber: www.muslimatnu.or.id, diakses pada tanggal 12 Juni 2021
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*, New York: Anchor Books, 1999
- Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Silvina Choirotul Fahmi dan Luhur Prasetyo, Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim (Studi pada Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah di Kabupaten Ponorogo), *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5 No. 2 Desember 2020, hlm. 345-369
- Siti Muslikati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1995
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1995
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006
- Soetrisno, Loekman, *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan. Dalam Dewanta (ed), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Aditya Medi, 1995
- Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International – IP, 2005
- Srilatha Batliwala, *Taking the Power out of Empowerment: An Experiential Account*, *Development in Practice*, vol. 17, no. 4/5, August 2007
- Suparjan & Hemptri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2003
- Supriatna, Tjahya. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1997
- Sutoro Eko, et., al., *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan Pertama FPPD 2014
- Syaefudin, AM. Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam, *JKTTI – No. 1-I*, 1997
- Syaparudin, *Islam dan Tenaga Kerja Wanita (Keadilan Ekonomi bagi Kaum Wanita)*, *MADANIA* Vol. XVII, No. 1, Juni 2013
- Tiara Tane dan Fatmariza, Peran Organisasi Perempuan dalam Pembangunan: Studi di Nagari Canduang Koto Laweh, *Journal of Civic Education*, Volume 3 No. 4 Tahun 2020
- Tomi Hendra, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran*, Hikmah Vol. XI, No. 02 Desember 2017

- Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2019
- Tsitsi, *Warisan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994
- Ulfi Putra Sany, Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 39 No 1 (2019), hlm. 32-44
- Wilis Werdiningsih, Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak, *Ijous*, Volume 1 No. 1 Tahun 2020, hlm. 1-16
- Wildaniyah Mufidatul A'yun. Urgensi Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (2), 2020
- Wiwin Windayanti, Bahri Ghazali, Rosidi, Abdul Syukur. The Regional Chairman of Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Role in Empowering the Islamic Community in Lampung *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, Volume 7, Issue 06, 2020
- W. J. S Poerwardarimta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, Cet. Ke-4 (Bandung, Mizan, 2006)
- Wrihatnolo & Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007
- Yasril Yazid dan Nur Alhidayatillah, *Dakwah dan Perubahan Sosial*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2017
- Yeni Salma Barlinti, Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan, *Lex Jurnalica*, Vol. 4 No. 3, Agustus 2007, Hlm. 158-167
- Yin, R. K. *Case Study Research: Design and Methods* (2rd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage, 2002
- Yvonne Y Haddad, *Contemporary Islam and the Challenge of History*, New York: State University of New York, 1980
- Zahra Zaini Arif, Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Juni 2019
- Zubaedi, Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013